

**PENERAPAN KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE*
DALAM PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

(Studi Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PETROKIMIA GRESIK)

SKRIPSI

ALAN AMARA

0910310005



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

Sapa nandur bakal ngundhuh, ngundhuh wohing pakarti.

(pepatah jawa)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Oktober 2014

Jam : 12.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Alan Amara

Judul : Penerapan Konsep *Triple Bottom Line* Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik).

Dan dinyatakan lulus

Majelis Penguji

Ketua



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Penguji 1



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024198601 1 002

Penguji 2



Mohammad Saïd, S.Sos, M.AP
NIP. 19780630/200812 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 20).

Malang, 08 September 2014



Alan Amara
NIM. 0910310005

RINGKASAN

Amara, Alan, 2014. PENERAPAN KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE* DALAM PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (Studi Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Pembimbing : (1) Dr. Suryadi, MS (2) Farida Nurani, S.Sos.,M.Si

Governance mendapat perhatian yang besar karena menjelaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyediakan pelayanan publik yang terbuka, menjalin hubungan informal dan formal antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberadaan *Good Governance* kemudian diadopsi di dunia perusahaan yang kemudian disebut dengan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* selain digunakan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, juga menjelaskan standar perilaku di dalam bisnis inti operasi sebagai *corporateresponsibility* dan standar perilaku di lingkungan eksternal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) mendorong munculnya *sustainability report* dengan menggunakan metode *triplebottomline*.

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan negara atau BUMN yang dalam aktivitasnya harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penulis meneliti mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada CSR PT Petrokimia Gresik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang benar-benar berpijak pada konsep *triple bottom line*. Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai langsung pihak KBL PT Petrokimia Gresik dan mitra binaan PT Petrokimia Gresik dengan *interview guide* yang terlampir, mencatat kegiatan penting yang ada di lapangan, kemudian menyajikan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan setelah dilakukan reduksi data dan dipilih data mana yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberi kontribusi positif kepada masyarakat terutama disekitar wilayah usaha perusahaan baik berupa pinjaman kemitraan, pembinaan pelatihan dan bantuan bina lingkungan. Pembinaan mitra binaan dilakukan untuk membekali kemampuan usaha sehingga diharapkan usaha dapat berkembang dengan baik dan mampu mengembalikan dana pinjaman kemitraan. Bagi PT Petrokimia Gresik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dapat meningkatkan citra positif PT Petrokimia Gresik di mata masyarakat, sehingga memperkuat "*brand*" perusahaan serta masyarakat semakin mengenal dan memahami berbagai produk dan jasa dari PT Petrokimia Gresik.

SUMMARY

Amara, Alan, 2014. TRIPLE BOTTOM LINE APPLICATION CONCEPTS IN PARTNERSHIP PROGRAM AND COMMUNITY DEVELOPMENT AS A FORM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Study in Partnership Program and Community Development PT Petrokimia Gresik). Minor Thesis. Department of Public Administration. Brawijaya University. Supervisor and Co. Supervisor : (1) Dr. Suryadi, MS (2) Farida Nurani, S.Sos.,M.Si

Governance gets the most attention because it explains the importance of partnerships between government, private sector and communities to provide extroverted public services, informal and formal relationships between the government, private sector and communities to realize good governance (good governance). The existence of good governance was adopted in the corporate world which was then called with good corporate governance. Good Corporate Governance is also used as a system to regulate and control the company, also describes the standard of behavior in the core business operations as a corporate responsibility and standards of behavior in the external environment as a Corporate Social Responsibility (CSR). The concept of corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility) to encourage the emergence of sustainability report using the triple bottom line.

PT Petrokimia Gresik is one of the state-owned enterprises in its activities must implement good corporate governance (GCG). The author examines the implementation of the Partnership and Community Development Program at PT Petrokimia Gresik CSR Program which is has an obligation to implement Corporate Social Responsibility (CSR) based on the concept of the triple bottom line. Researchers collected data to go directly to the field with direct interviewing to the KBL Department of PT Petrokimia Gresik and the partners of PT Petrokimia Gresik with the attached interview guidelines, noting that there is an important activity in the field, then presents the data according to the situation on the ground after the data reduction and where the data selected which according to the research focus.

Implementation of the Partnership and Community Development Program provides a positive contribution to the community, especially around the area of the company's business in the form of loans partnerships, training and coaching aid for environmental development. Development of the partners carried out to equip the ability of the business so that the business can be expected to develop well and able to repay the borrowed funds partnerships. For PT Petrokimia Gresik through the Partnership and Community Development Program, can enhance the positive image of PT Petrokimia Gresik in the eyes of the community, thereby strengthening the company's brand as well as the community to know and understand the various products and services of PT Petrokimia Gresik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada PT Petrokimia Gresik)** yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti M.Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Suryadi, MS dan Ibu Farida Nurani, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rochmad Purnomo, SE.MM selaku Kasi Akuntansi & Keuangan, Departemen KBL PT Petrokimia Gresik yang telah membantu peneliti mendapatkan banyak data dan membantu terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Publik dan berbagai pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 08 September 2014

Penulis



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Administrasi Publik menuju <i>Good Governance</i>	13
1. Administrasi Publik	13
2. <i>Good Governance</i>	15
B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	20
1. Keterkaitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan <i>Good Governance</i> (GG)	20
2. Karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	21

3. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	26
C. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	35
1. <i>Pengertian Corporate Social Responsibility</i>	35
2. <i>Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	36
3. <i>Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	38
4. <i>Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	41
5. <i>Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	45
6. <i>Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	46
7. <i>Kategori Perusahaan Menurut Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	48
8. <i>Konsep Triple Bottom Line</i>	49
9. <i>Peraturan Mengenai Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	54
D. <i>Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. <i>Jenis Penelitian</i>	64
B. <i>Fokus Penelitian</i>	65
C. <i>Lokasi Penelitian</i>	66
D. <i>Jenis Sumber Data</i>	66
E. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	68
F. <i>Instrumen Penelitian</i>	69
G. <i>Analisis Data</i>	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. <i>Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian</i>	74

1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik	74
a. Letak Geografis	74
b. Keadaan Penduduk	75
c. Pertumbuhan Ekonomi	77
2. Gambaran Umum PT. Petrokimia Gresik	79
a. Sejarah Singkat Perusahaan	79
b. Visi & Misi Perusahaan	79
c. Logo Perusahaan	81
d. Kapasitas Produksi dan Jasa	82
B. Penyajian Data	85
1. Penerapan konsep <i>triple bottom line</i> dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR PT. Petrokimia Gresik	85
a. Program kerja organisasi dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)(lebih difokuskan pada Program Kemitraan).....	85
b. Alokasi dana dan sumber daya lain dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)(lebih difokuskan pada Program Kemitraan)	95
c. Sasaran atau target Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)(lebih difokuskan pada Program Kemitraan).....	98
d. Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (dari faktor internal maupun eksternal) (yang lebih fokus pada Program Kemitraan)	107
2. <i>Input, output, outcomes, benefit, dan impact</i> dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Petrokimia Gresik (lebih difokuskan pada Program Kemitraan).....	109
C. Pembahasan	115
1. Penerapan konsep <i>triple bottom line</i> dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR PT. Petrokimia Gresik	118

a. Program kerja organisasi dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)(lebih difokuskan pada Program Kemitraan)....	118
b. Alokasi dana dan sumber daya lain dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)(lebih difokuskan pada Program Kemitraan)	120
c. Sasaran atau target Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)(lebih difokuskan pada Program Kemitraan).....	124
d. Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (dari faktor internal maupun eksternal) (yang lebih fokus pada Program Kemitraan).....	126
2. <i>Input, output, outcomes, benefit, dan impact</i> dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Petrokimia Gresik (lebih difokuskan pada Program Kemitraan).....	127
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Hubungan antara GG, GCG, CSR dan <i>Triple Bottom Line</i> atau <i>Triple P</i>	50
2.	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	73
3.	Peta Kabupaten Gresik	75
4.	Logo PT Petrokimia Gresik	81
5.	Struktur Organisasi Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan	110



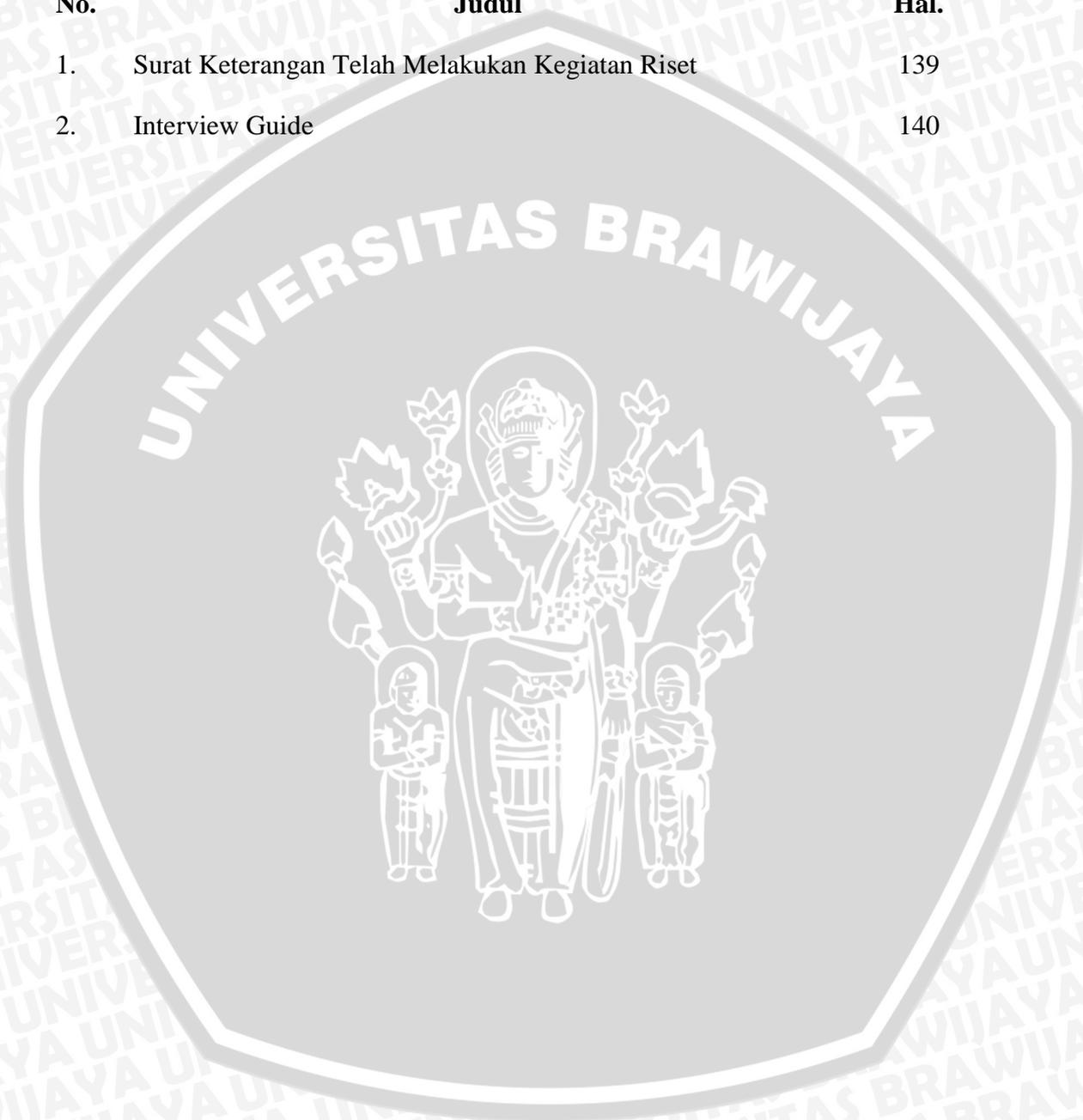
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Manfaat pelaksanaan program CSR bagi perusahaan	47
2.	Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i>	53
3.	Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Penduduk per Keluarga Menurut Kecamatan	76
4.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2011-2012	78
5.	Jumlah Pabrik PT Petrokimia Gresik & Kapasitas	84
6.	Perkembangan jumlah mitra binaan	92



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Riset	139
2.	Interview Guide	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercapainya tujuan suatu negara bergantung pada cara pemerintah mengelola administrasi publik sebagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Perkembangan administrasi publik bukan lagi sekedar sebagai instrumen negara, melainkan lebih sebagai sarana publik untuk menyelenggarakan tatakelola kepentingan bersama untuk mencapai tujuan publik yang telah disepakati. Administrasi publik telah memasuki wilayah peran publik yang lebih substantif, menempatkan segala urusan publik tidak hanya sebagai urusan negara melainkan juga urusan swasta dan masyarakat. Administrasi menurut Nicholas Henry merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek terkait dengan hubungan peran pemerintah dan masyarakat untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Keban, 2008:6). Sehingga administrasi publik dapat dipahami sebagai sesuatu yang dikerjakan pemerintah (*“what government does”*) terkait dengan pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja tetapi secara bersama.

Perkembangan tugas dan fungsi ketatanegaraan suatu negara serta adanya perubahan dalam faktor lingkungan dapat mempengaruhi eksistensi dari administrasi publik. Kondisi suatu negara yang selalu berjalan dinamis,

sehingga administrasi publik juga terjadi perubahan pandangan, nilai, metode dalam implementasinya. Ditunjang pula dengan pola pikir masyarakat demokratis yang ingin berkontribusi dalam urusan tata negara dan menganggap pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Pernyataan demikian sesuai pandangan G. Shabbir Cheema yang mengungkapkan empat fase administrasi publik yang salah satu fasenya adalah *governance* (Keban, 2008:37).

Dewasa ini *governance* mendapat perhatian yang besar karena menjelaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyediakan pelayanan publik. *Governance* merubah administrasi publik ortodoks yang kaku, tertutup dan didominasi oleh pemerintah menjadi lebih fleksibel, terbuka, menjalin hubungan informal dan formal antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Mindarti (2005:202) bahwa:

"*Good Governance* terdapat 3 domain utama yaitu negara (*state*), swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*). *Good Governance* pada dasarnya berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (*state*), swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*), yang didukung dengan adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan."

Keberadaan *Good Governance* kemudian diadopsi di dunia perusahaan yang kemudian disebut dengan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* selain digunakan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, juga menjelaskan standar perilaku di dalam bisnis

inti operasi sebagai *corporate responsibility* dan standar perilaku di lingkungan eksternal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) muncul karena adanya prinsip GCG yang menuntut pertanggungjawaban terhadap kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Orientasi sebuah usaha yang mencari keuntungan semata (*profit-oriented*) kemudian diterima secara luas dalam dunia usaha sebagai *business is business* dapat membuat sebuah perusahaan menghalalkan segala macam cara untuk bisa meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga seringkali terjadi gesekan-gesekan kepentingan baik di dalam internal perusahaan sendiri ataupun antara perusahaan dengan pihak eksternal. Oleh karena itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap penting agar perusahaan tidak hanya fokus mencari keuntungan semata dan para pemilik modal tidak lagi menganggap sebagai pemborosan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dimasyarakat yang berguna untuk menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) muncul karena adanya konsep *social sustainability* sebagai penyempurnaan dari konsep *economic sustainability* dan *environmental sustainability* yang dianggap belum dapat mengangkat kesejahteraan komunitas di negara-negara di dunia. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dirumuskan untuk untuk menyeimbangkan kesejahteraan pembangunan baik di negara-negara selatan

maupun negara-negara utara. Dengan latar belakang tersebut dirumuskan suatu visi yang sama dalam dunia usaha yang semakin mendunia untuk mewujudkan kebersamaan aturan bagi tingkat kesejahteraan umat manusia yaitu konsep *social sustainability*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, komunitas luas serta melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) mendorong munculnya *sustainability report* dengan menggunakan metode *triple bottom line*. *Triple bottom line* terdiri dari *profit* (ekonomi), *people* (sosial), *planet* (lingkungan). Disini dapat dijabarkan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan *profit* salah satunya dengan memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat untuk memajukan usahanya, yang berhubungan dengan *people* (sosial) salah satunya dengan memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa pada masyarakat ataupun anak-anak dari karyawan perusahaan itu sendiri dan *planet* (lingkungan) salah satunya yaitu melakukan penghijauan atau kegiatan yang berhubungan dengan alam sekitarnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan haruslah berpijak pada konsep ini. Kebanyakan yang terjadi adalah CSR yang dilakukan masih belum sepenuhnya berpijak pada *triple bottom line* karena banyak yang ditemui adalah kegiatan yang masih berorientasi pada *profit* (ekonomi) dan *people*

(sosial) yang berupa banyaknya program kemitraan yang dilakukan. Sedangkan yang berorientasi pada *planet* (lingkungan) biasanya dilakukan dengan penghijauan, pengelolaan air, dan pengendalian polusi. Agar perusahaan mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas usahanya, maka perusahaan harus melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang berpijak pada *triple bottom line*.

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan negara atau BUMN yang dalam aktivitasnya harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan penjelasan dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan yang bidang usaha utamanya adalah pupuk yang terbesar di Indonesia yang sudah diakui reputasinya dan tentu saja berperan banyak dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 CSR perseroan ini meyakini dan menyadari pentingnya aktivitas program CSR yang memberikan dampak positif dalam perkembangan masyarakat dan kemajuan serta memelihara kelangsungan usaha perusahaan. PT Petrokimia Gresik kemudian merefleksikan regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) melalui tujuan jangka panjang yaitu bertekad untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang, menjaga nilai, norma, dan budaya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, memegang teguh komitmen terkait pengembangan

sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, sehingga seluruh kegiatan perseroan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat sekitar dimana perseroan beroperasi.

Dampak pelaksanaan kebijakan mengenai tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaannya, dan disebutkan bahwa program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan oleh BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang pada hakekatnya mempunyai tujuan serupa dengan CSR. Memenuhi amanat dalam regulasi diatas adalah sebagai wujud kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar, BUMN melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari *corporate action*.

Industri kecil mempunyai peranan yang sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan industri secara keseluruhan dalam perekonomian nasional, karena mencakup hampir seluruh lapangan usaha baik yang ada di desa maupun di kota. Dalam hal ini, BUMN meningkatkan partisipasi melalui Program Kemitraan melalui usaha kecil untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat lingkungan sekitar,

mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan citra baik perusahaan di kalangan masyarakat.
2. Keberadaan perusahaan dapat diterima dan mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Sebagai wujud partisipasi perusahaan dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat.

PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil sejak tahun 1984, meliputi wilayah pulau Jawa, Madura, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Sejak tahun 1995, atas penugasan pemerintah, PT Petrokimia Gresik memfokuskan Program Kemitraan hanya di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2004, wilayah binaan berkembang lagi menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2005 wilayah binaan berubah lagi menjadi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 2012 lebih difokuskan pada daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki potensi pada sektor agraris yaitu pertanian dan peternakan yang berkompeten. Sektor-sektor yang dibina meliputi Industri, Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Sektor Jasa.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* PT Petrokimia Gresik. Untuk itu penulis mengambil judul **Penerapan Konsep *Triple Bottom Line* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi pada PT Petrokimia Gresik)**. Mengingat bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang benar-benar berpijak pada konsep *triple bottom line* (*profit, people, and planet*) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaannya dan dalam pelaksanaannya tersebut kemitraan yang dilakukan harus benar-benar terjadi dimana semua pihak harus ikut berpartisipasi atas terlaksananya program tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan konsep *triple bottom line* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik?
2. Apa sajakah *input, output, outcomes, benefit, dan impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Petrokimia Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai penerapan *triple bottom line* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apa sajakah *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Dari segi akademis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap penerapan *triple bottom line* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik dan sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh di kampus.

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam rangka meningkatkan peran perusahaan dalam menerapkan *triple bottom line* pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran sebagai bahan masukan bagi perusahaan khususnya PT Petrokimia Gresik dalam meningkatkan perannya untuk menerapkan konsep *triple bottom line* dalam pelaksanaan PKBL sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan.

E. Sistematika Pembahasan

Merupakan gambaran umum tentang konsep pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih sistematis. Pokok-pokok sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian dan uraian sistematika pembahasan sebagai penutup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi, dalam hal ini menyangkut masalah *Good Governance*, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Karena metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka uraian dalam bab ini menggunakan fokus penelitian, teknik pengumpulan data dengan data dan hasil interview yang terlampir.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan penyajian data penelitian dari rumusan masalah tentang penerapan konsep *triple bottom line* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik, kemudian apa saja yang menjadi *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Petrokimia Gresik, yang selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II kajian pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang penerapan konsep *triple bottom line* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Petrokimia Gresik, kemudian apa saja yang menjadi *input, output, outcomes, benefit, dan impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Petrokimia Gresik, serta terdapat saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan keefektifan dan pengembangan dari kerjasama antar sektor ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik menuju *Good Governance*

1. Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata *to administer*, yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Dalam Gie (1978) terdapat 3 macam pengertian administrasi yakni :

1. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian proses atau kegiatan.
2. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian tata usaha.
3. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian pemerintah atau administrasi publik.

Sedangkan pengertian administrasi publik sendiri menurut Felix A. Nigro bahwa administrasi publik itu adalah :

1. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik.
2. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan: eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pertalian diantara ketiganya.

3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*publik policy*) dan merupakan bagian proses politik.
4. Amat berbeda dengan administrasi *privat*.
5. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. (Sukidin, 2009:10-11)

Nicholas Henry (dalam Indradi, 2008:12), melihat administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan menurut Miftah Thoha (2005:54), ilmu administrasi publik merupakan suatu kajian yang sistematis dan tidak hanya sekedar tulisan abstrak akan tetapi memuat perencanaan realistis dari segala upaya dalam menata pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pergeseran paradigma telah terjadi dalam ilmu administrasi publik, mulai dari paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Administration* (NPA), kemudian sampai pada paradigma yang menjadi isu global saat ini yaitu *Good Governance* (GG). Berikut ini akan sedikit dijelaskan mengenai *Good Governance* (GG) yang sangat erat kaitannya dengan judul yang diambil.

2. *Good Governance* (GG)

a. Pengertian dan konsep *Good Governance* (GG)

Istilah *Governance* bukan hanya mengandung arti pemerintahan dalam suatu kegiatan, akan tetapi juga berarti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan, dan serta diartikan sebagai pemerintahan. Menurut Rochman dalam Sedarmayanti (2009:276) menyatakan *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Sedangkan menurut Kooiman dalam Sedarmayanti (2009:276-277) *Governance*, merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan, kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sedangkan definisi *Good Governance* (GG) menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul *Governance for Sustainable Human Development*, *governance* sebagai “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan *instrument* kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan

integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.” (Sedarmayanti, 2003:34)

UNDP dalam Sinambela (2006:48), para *stakeholder* yang berperan sebagai pelaku *Good Governance* (GG) yaitu:

a. Negara atau pemerintah (*government*)

1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, sosial yang stabil.
2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.
3. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*
4. Menegakkan hak asasi manusia.
5. Melindungi lingkungan hidup.
6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

b. Sektor swasta (*privat sector*)

1. Menjalankan industri.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Menyediakan insentif bagi pegawai.
4. Meningkatkan standar hidup masyarakat.
5. Memelihara lingkungan hidup.
6. Menaati peraturan.
7. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
8. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.

c. Masyarakat madani (*civil society*)

1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi.
2. Mempengaruhi kebijakan publik.

3. Sebagai sarana *check and balance* pemerintah.
4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah.
5. Mengembangkan sumber daya manusia.
6. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat madani adalah :

1. Pengaturan di dalam sektor publik, antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif yaitu presiden beserta pelaksana pemerintah, legislatif yaitu DPR dan MPR, serta yudikatif yaitu lembaga peradilan atau pengadilan. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multi nasional koperasi, dan sebagainya.
3. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olahraga, kelompok kesenian, dan sebagainya.

(Sedarmayanti, 2009:279-280)

b. Karakteristik dan prinsip *Good Governance* (GG)

Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktek *Good Governance* (GG), antara lain :

- a. Praktek *Good Governance* (GG) harus memberi ruang kepada aktor lembaga non pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar.
- b. Dalam praktek *Good Governance* (GG) terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting.
- c. Praktek *Good Governance* (GG) adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegak hukum, dan akuntabilitas publik. (Dwiyanto, 2008:18)

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) memformulasikan beberapa ciri-ciri dan sekaligus menjadi prinsip utama bagi negara untuk mewujudkan *Good Governance* (GG), yang meliputi:

1. *Participations*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut, dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, adanya keterbukaan yang dibangun di atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan secara tepat waktu.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. (Mardiasmo, 2002:24)

Negara atau pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat akan bekerja sama dengan pihak swasta, salah satunya dalam bentuk pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya minimal 51% dimiliki oleh negara atau pemerintah. Pada sub bab berikut ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BUMN.

B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Keterkaitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan *Good Governance* (GG)

Terdapat 3 (tiga) *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang memiliki peran penting dalam *Good Governance* (GG) yaitu *state* (negara atau pemerintah), *privat sector* (sektor), dan *civil society* (masyarakat madani). Untuk menyejahterakan masyarakatnya maka pihak *state* (negara atau pemerintah) menggandeng atau bekerja sama dengan *privat sector* (sektor swasta) dalam memberikan pelayanan terhadap *civil society* (masyarakat). Hal ini dilakukan agar tercapaitujuan dan fungsi negara atau pemerintah yakni salah satunya adalah mewujudkan *Good Governance* (GG) yang memang menjadi tolok ukur bagi suatu negara dalam menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Oleh karena itu, negara atau pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perusahaan publik atau sering disebut sebagai *State-Owned Enterprises* dan di Indonesia lebih dikenal sebagai BUMN menurut Akadun (2007:19) berasal dari teori ekonomi yaitu:

1. Adam Smith menentang sebuah teori tentang *The Invisible Hand*, maka eksistensi peran sektor publik semata-mata hanya bersifat *basic jobs of goverment*, seperti *protecting the society, administration of justice, and creating and maintaining of public institution*. Dalam kondisi demikian maka hampir dapat dipastikan

bahwa pemerintah sangat minim terlibat dalam mekanisme pasar dan perekonomian secara luas. Tangan-tangan ajaib pasar benar-benar diberi kebebasan untuk mendistribusikan pendapatan pada masyarakat sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai penjaga malam saja. (*Policy State*)

2. Perkembangan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tangan-tangan ajaib yang bernama pasar, tidak seluruhnya mampu memberikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat. Pasar mengalami kegagalan dalam distribusi pendapatan. Implikasinya pemerintah dituntut untuk tidak hanya berperan mengurus *basic jobs* saja akan tetapi juga ikut serta dalam mengatasi kegagalan pasar. Intervensi pemerintah terhadap pasar ini harus ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Dalam posisi ini negara berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (*Welfare State*)

2. Karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh negara, sedangkan yang tidak seluruhnya dimiliki oleh negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN digolongkan sebagai berikut (Ibrahim, 1997:117) :

- a. Usahanya bersifat tugas-tugas perintisan dan pembangunan prasarana tertentu.

- b. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai oleh negara.
- c. Dilaksanakan atas dasar untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tertentu dan atau strategis.
- d. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.
- f. Usaha bersifat komersil dan fungsinya dilakukan oleh swasta.

BUMN merupakan alat pemerintah yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan, karena peranan BUMN *agent of development* diharapkan dapat mensukseskan pembangunan masyarakat. Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Pandji (1995:117-119), ditemukan bahwa BUMN melaksanakan multi fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Agen pembangunan, artinya bertugas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Orientasinya menyediakan barang dan jasa yang bersangkutan mempunyai sifat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Misalnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan membuka daerah baru, sehingga peranannya sebagai berikut :
 1. Memberikan sumbangan untuk mengembangkan perekonomian negara disamping menambah pendapatan negara.

2. Menjadi pioner dalam hal kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 3. Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan, seperti bidang transportasi umum dan air bersih, listrik, telekomunikasi, minyak dan gas. Komoditas tersebut menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau ingin meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata, barang dan jasa harus disediakan dengan harga yang cukup rendah (atau gratis sama sekali), sehingga berperan sebagai :
1. Memberikan kemanfaatan umum, baik berupa barang dan jasa kepada masyarakat banyak.
 2. Melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dalam penyediaan barang dan jasa, yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Instrumen penjaga harga, BUMN dipertahankan dalam tingkat persaingan yang ketat dengan swasta, karena ingin dipakai sebagai penjaga harga. Kalau pasar mengendur dan berkembang menuju bentuk monopolistik, maka BUMN bisa dipakai untuk menjual barang dengan harga yang murah, agar pesaing-pesaing dihambat dalam hal kenaikan harga. Seperti peranan untuk memberikan bimbingan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha modal kecil

dan koperasi. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha)
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP 1.000.000.000,-
- d. Menghasilkan laba/keuntungan, adalah salah satu dari produsen yang dalam pasar bersaing dengan banyak produsen swasta. Apakah pemerintah perlu memiliki BUMN yang demikian atau sebaliknya diserahkan kepada swasta. Apakah harga yang terbentuk dengan mekanisme pasar dan harga menjadi terjangkau oleh masyarakat banyak. Maka, yang demikian tidak terlalu diperlukan atau boleh dipertahankan sebagai sumber pendapatan pemerintah.
- e. Benteng pertahanan persaingan ekonomi global, dalam kondisi globalisasi ekonomi dunia dan dalam mengatasi investasi asing sangat dominan dan swasta nasional tidak ada yang mampu, maka pemerintah dapat mengerahkan semua potensi yang ada, agar dominasi barang-barang impor tersebut bisa disaingi. Contoh Perancis mendirikan BUMN dalam bidang elektronik dengan membeli perusahaan Thomson dan Nordmende, dalam rangka membendung dominasi barang elektronik Jepang, khususnya Perancis dan umunya Eropa Barat.

Agar tercipta suatu efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha maka BUMN dipengaruhi paradigma pemerintah yang mengatur perusahaan yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) sangat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menarik minat investor untuk berinvestasi, baik dalam bentuk investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*undirect investment*). Dalam pelaksanaannya *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan erat dengan *Corporate Governance* yang dianut dan sampai dimana tingkat manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para *stakeholder* (pemegang saham). Melalui mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) ini, maka dengan sendirinya akan mendorong tumbuhnya *check and balance* di lingkungan manajemen khususnya dalam memberikan perhatian kepada kepentingan *shareholder* dan *stakeholder*. Dengan demikian, semakin baik suatu negara menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), berarti semakin baik pula perlakuan terhadap investor. Hal ini sangat tergantung dari *political will* pemerintah itu. Berikut ini akan dijabarkan lebih jauh mengenai *Good Corporate Governance* (GCG).

3. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Surya dan Yustiavandana (2006:25) mendeskripsikan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

"*Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board, dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien."

Jadi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai-nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

b. Aspek *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Wahyudi dan Azheri (2008:162-163) bahwa :

"Tidak adanya definisi yang universal mengenai konsep *Corporate Governance*, sehingga berdampak pula terhadap standar formulasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif yang dapat diterapkan pada masing-masing perusahaan. Oleh karena itu penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sangat tergantung pada kondisi perusahaan, sehingga diharapkan masing-masing perusahaan baik itu perusahaan yang berbentuk BUMN maupun swasta murni membuat standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu pada standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku pada negara dimana perusahaan berdomisili dan standar internasional (*best practices*). Oleh sebab itu, setiap *Corporate Governance Code* di masing-masing negara harus memasukkan aspek universal."

Aspek universal diantaranya adalah (Wahyudi dan Azheri, 2008:162-163):

a. Tujuan perusahaan (*corporate objective*)

Berkaitan dengan upaya perusahaan menjamin *sustainable* bisnis untuk jangka panjang dan untuk menjaga hubungan dengan *shareholder* yang efektif. Perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi secara akurat, memadai, dan tepat waktu, transparan

terhadap investor terhadap akuisisi, hak dan kewajiban kepemilikan, serta penjualan saham.

b. Hak suara (*voting rights*)

Perusahaan harus menjamin hak suara dari setiap ownership dan mewajibkan adanya keterbukaan (*disclosure*) yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.

c. *Non-Executive Corporate Board*

Melibatkan anggota *non-executive* yang independen dalam jumlah dan kompetensi yang memadai. *Non-executive* sebaiknya tidak kurang dari 2 orang dan sama banyaknya dengan *substansial majority*. Komite audit, remunerasi, dan nominasi sebaiknya beranggotakan *non-executive*.

d. Kebijakan remunerasi perusahaan (*corporate remuneration policy*)

Sebaiknya dalam laporan tahunan perusahaan seharusnya mengungkapkan (*disclosure*) kebijakan *board* tentang remunerasi, sehingga investor dapat memutuskan apakah praktek dan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan standar, kepatutan, dan kepatuhan.

e. Fokus strategi (*strategic focus*)

Setiap modifikasi atas bisnis utama (*core business*) harus dilakukan atas persetujuan *shareholders*. Begitu pula halnya bila terjadi perubahan yang signifikan terhadap perusahaan dan secara material berpengaruh melemahkan ekuitas atau mengikis *economic interest* atau hak kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada.

f. Kinerja operasional (*operating performance*)

Boards directors harusnya memfokuskan perhatiannya pada *corporate governance framework* dalam upaya mengoptimalkan kinerja perusahaan.

g. *Shareholder returns*

Boards directors harusnya memfokuskan perhatiannya pada *corporate governance framework* dalam upaya mengoptimalkan *returns* kepada *shareholders*.

h. *Corporate citizenship*

Perusahaan harus tunduk dan taat pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada wilayah hukum dimana perusahaan melakukan bisnisnya.

i. Implementasi *Corporate Governance*

Apabila suatu negara telah memiliki *code* dalam rangka praktek *Good Corporate Governance* (GCG), maka perusahaan harus melaksanakannya.

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Mengingat *Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep tata kelola perusahaan yang sebaik-baiknya, tentu saja dalam pengelolaan tersebut terkait dengan beberapa prinsip yang harus dipahami oleh setiap perusahaan. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

a. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (Kaihatu, 2006:3). Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para *stakeholder* yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standart akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong serta terbuka. (Wahyudi dan Azheri, 2008:166)

b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Kaihatu, 2006:3). Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) didasarkan atas *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan

komisaris dan auditor. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. (Wahyudi dan Azheri, 2008:167)

- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (Kaihatu, 2006:3). Hal ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan sebagai bagian lembaga dalam kehidupan masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Prinsip ini diwujudkan atas dasar bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, memelihara lingkungan bisnis yang sehat. (Wahyudi dan Azheri, 2008:167)
- d. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) atau kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam; *self-*

dealing dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan *equal job opportunity*.

(Wahyudi dan Azheri, 2008:166)

d. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan swasta murni maka manfaat yang diperoleh yaitu:

- a. Dengan pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG) proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
- b. *Good Corporate Governance* (GCG) akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat dari tindakan tersebut.

- c. Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat meningkatnya kepercayaan mereka terhadap pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.
 - d. Bagi para pemegang saham, dengan adanya peningkatan kinerja maka dengan sendirinya akan meningkatkan nilai saham mereka dan juga nilai deviden yang akan mereka terima.
 - e. Karena dalam *Good Corporate Governance* (GCG) para karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola secara baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja para karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
 - f. Dengan baiknya pelaksanaan *Corporate Governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga dapat menaikkan citra positif perusahaan. Hal ini tentu saja dapat menekan biaya yang timbul sebagai akibat dari tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.
 - g. Penerapan *Corporate Governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
- [\(<http://forester-azharmaskum.blogspot.com>\)](http://forester-azharmaskum.blogspot.com)

BUMN dalam menjalankan aktivitasnya harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kebijakan mengenai tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang *Good Corporate*

Governance (GCG). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan BUMN melakukan pembenahan kembali terhadap tata kelola perusahaan mereka. BUMN perlu menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, yaitu dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya.
- b. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.

Sedangkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam BUMN sendiri diuraikan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparansi, dan efisiensi serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian pengelola perusahaan.

- c. Mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan.
- d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.

BUMN dalam menjalankan aktivitasnya harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kebijakan mengenai tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Dampak dari pelaksanaan kebijakan ini menyentuh sampai pada *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada sub bab berikutnya akan dijabarkan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

C. Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005) dalam Kartini (2009:6) adalah “*CSR means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect*

people, their communities, and their environment.” (CSR diartikan bahwa sebuah perusahaan seharusnya membangun akuntabilitas untuk tindakan yang mempengaruhi masyarakat, komunitas di sekitar perusahaan, dan lingkungan di sekitar perusahaan).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Wibisono (2007:7) pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat luas.

Penerapan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata kelola perusahaan yang baik bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu diterapkannya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini termasuk dalam penerapan prinsip *responsibility* (*responsibility*) dari perusahaan.

2. Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

BUMN dalam menjalankan aktivitasnya harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kebijakan mengenai tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Keputusan

Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Dampak dari pelaksanaan kebijakan ini menyentuh sampai pada tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab (responsibility).

Di Inggris, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) diasosiasikan dengan pertanggungjawaban dan kewajiban direksi terkait dengan urusan finansial perusahaan. Sistem hukum perusahaan Inggris menganut sistem tripartit yang terdiri dari direksi, pemegang saham, dan auditor perusahaan. Peranan pemegang saham dan auditor adalah untuk memastikan bahwa direksi tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. (Khairandy dan Malik, 2007)

Sedangkan di Amerika Serikat konsep *Corporate Governance* lebih dimaknai dalam arti luas, karena *Corporate Governance* diidentikkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan perilaku etis para *stakeholders* yang didalamnya termasuk para karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, masyarakat lokal, dan sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus dilihat sebagai *trustee* dan hubungannya dengan para *stakeholders* harus didasarkan pada kontrak sosial, dimana perusahaan secara moral terkait pada *constituency statues* untuk memperhatikan seluruh kepentingan mereka dalam kelompoknya. (Wahyudi dan Azheri, 2008)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu penerapan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai identitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

3. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Bila disimpulkan, pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Artinya, meskipun secara moral adalah baik jika perusahaan mengejar keuntungan, tetapi bukan berarti perusahaan tersebut dibenarkan mengorbankan kepentingan pihak lain untuk mencapai keuntungan tersebut. Oleh karena itu setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu berdiri.

Di sisi lain Brodshaw dan Vogel dalam Wahyudi dan Azheri (2008:46) menyatakan bahwa ada 3 dimensi dari garis besar ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Corporate Philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan

atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.

- 2) *Corporate Responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- 3) *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan 3 dimensi ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut, ternyata dalam prakteknya ada beberapa terminologi yang mempunyai kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain pemberian amal perusahaan (*Corporate Giving/Carity*), kedermawanan perusahaan (*Corporate Philantrophy*), relasi kemasyarakatan perusahaan (*Corporate Comunity/Public Relation*) dan pengembangan masyarakat (*Comunity Development*).

Menurut Jack Mahoney dalam orasinya yang dikutip oleh Wahyudi dan Azheri (2008:47-50) menegaskan bahwa melalui praktek etis dunia

usaha modern sedikitnya ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dilibatkan atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial:
 - a. Perusahaan dan karyawan adalah bagian integral dari masyarakat setempat.
 - b. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumberdaya alam atau lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dan pada tingkat tertentu masyarakat telah berjasa pada perusahaan dengan menyediakan tenaga profesional yang telah mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.
 - c. Perusahaan telah memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat.
 - d. Sebagai upaya menjalin interaksi dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, supaya keberadaan perusahaan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Akhirnya pada tingkatan tertentu akan melahirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap perusahaan. Dengan sendirinya kondisi ini akan menciptakan iklim sosial dan politik yang kondusif.

2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktivitas sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan sangat menunjang kegiatan bisnis dan pada akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri.
3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.
4. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan.

4. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Salah seorang pakar *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari *University of Bath* Inggris yaitu Alyson Warhurst, dimana pada tahun 1998 beliau menjelaskan ada 16 prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun prinsip-prinsip itu sebagai berikut (Wahyudi dan Azheri, 2008:57-60) :

- a) Prioritas perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian suatu perusahaan dapat membuat suatu kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.

- b) Manajemen terpadu. Manajer sebagai kendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
- c) Proses perbaikan. Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
- d) Pendidikan karyawan. Karyawan sebagai *stakeholder primer* harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.
- e) Pengkajian. Sebelum melakukan sesuatu sekecil apapun kegiatan itu perusahaan tersebut harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya.
- f) Produk dan jasa. Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk barang dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
- g) Informasi publik. Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas produk barang atau jasa.

- h) Fasilitas dan operasi. Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dan suatu kegiatan perusahaan.
- i) Penelitian. Melakukan dan atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud.
- j) Prinsip pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan produk barang dan jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- k) Kontraktor dan pemasok. Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
- l) Siaga menghadapi darurat. Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (*emergency*), instansi berwenang, dan

komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.

m) *Transfer best practice*. Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

n) Memberikan sumbangan. Sumbangan ini ditujukan pada pengembangan usaha bersama, kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

o) Keterbukaan (*disclosure*). Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respon terhadap resiko potensial (*potencial hazard*) yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.

p) Pencapaian dan pelaporan. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.

5. Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam penerapannya secara ringkas bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat digolongkan dalam 4 (empat) bentuk yaitu (Wahyudi dan Azheri, 2008:62-63):

- a. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
- b. Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *Comunity Development* (CD) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.
- c. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan atau lahan.

- d. Investasi sosial yang sering kali diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberikan dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (*corporate image*).

(Wahyudi dan Azheri, 2008:62-63)

6. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penjelasan Jorg Andriof dan Malcolm McIntosh yang dikutip oleh Wahyudi dan Azheri menegaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) meliputi semua dimensi dari dampak, hubungan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini memperlihatkan sebuah pengaruh yang tersebar luas di dalam masyarakat. Oleh karena itu perusahaan perlu melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawabnya atas dampak yang ditimbulkan. Penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri memiliki manfaat, seperti yang diungkapkan oleh Gurvy Kavei, pakar manajemen dari Universitas Manchester, yaitu diantaranya:

- a. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, *assessment* dan komunitas investasi.

- c. Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan dihargai.
- d. Menurunkan kerentanan gejala dengan komunitas.
- e. Mempertinggi reputasi dan *corporate branding*. (Wahyudi dan Azheri, 2008:124-125)

Apa yang dinyatakan oleh Kavei, terutama dalam hal reputasi dan *corporate branding*, selaras dengan hasil riset majalah SWA atas 45 perusahaan di Indonesia. Dalam riset yang dilakukan pada tahun 2005, ditanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu pertanyaannya adalah “apa manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan?”. Hasil riset menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) bermanfaat dalam hal memelihara dan meningkatkan citra perusahaan memiliki prosentase tertinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Manfaat pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan

Sumber: Riset majalah SWA tahun 2005 dikutip dari Wahyudi dan Azheri(2008:125)

Manfaat pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi perusahaan	Prosentase
Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan	37,38 %
Hubungan yang baik dengan perusahaan	16,82%
Mendukung operasional perusahaan	10,28%
Saran aktualisasi perusahaan dan karyawannya	8,88%
Memperoleh bahan baku dan alat-alat produksi perusahaan	7,48%
Mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan	5,61%
Lainnya	13,5%

Hasil riset majalah SWA yang berkaitan dengan manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan semakin menguatkan dugaan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai investasi sosial sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk jangka panjang. *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan menjadi aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan ditengah persaingan iklim bisnis. Selain itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai investasi sosial akan menjadi landasan fundamental bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

7. Kategori Perusahaan Menurut Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengusaha menurut Untung (2008:7-9) terkait dengan praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Kelompok hitam, adalah mereka yang tidak melakukan praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan, sosial, dan sekelilingnya dalam menjalankan usaha. Bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
- b. Kelompok merah, adalah mereka yang mulai melaksanakan praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya.

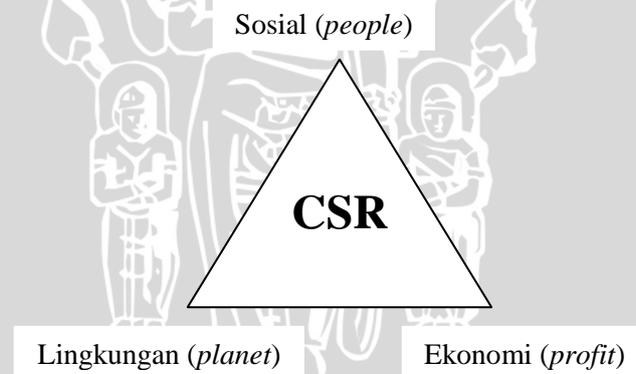
Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, akan tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapat tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Corporate Social Responsibility* (CSR) jenis ini kurang berimbas pada pembentukan citra positif pada perusahaan karena publik melihat kelompok ini memerlukan tekanan dan gertakan sebelum melakukan praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR). Praktek ini tidak akan berkontribusi bagi sumber daya.

- c. Kelompok biru, adalah perusahaan yang menilai praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan suatu investasi, bukan biaya.
- d. Kelompok hijau, adalah perusahaan yang sudah menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada strategi inti dari jantung bisnisnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi juga kebutuhan yang memerlukan modal sosial.

8. Konsep *Triple Bottom Line*

Berdasarkan pengertian CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, John Elkington's mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang dikenal dengan istilah "*Triple Bottom Line*". Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan

sosial (*social justice*). Jika suatu perusahaan ingin berkelanjutan, maka *triple bottom line* menjadi suatu syarat utamanya dan harus memperhatikan “*Triple P*” yaitu ekonomi (*profit*), sosial (*people*), lingkungan (*planet*) (Wibisono dalam Azheri, 2012:35). Aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka perusahaan itu gagal dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya atau yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selain itu jika perusahaan hanya menekankan pada satu aspek dalam penerapannya, maka perusahaan akan dihadapkan pada berbagai bentuk resistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan akan sulit atau bahkan tidak mampu beraktivitas secara berkelanjutan.



Gambar 1. Hubungan antara *Triple Bottom Line* atau *Triple P*

Sumber: Wahyudi dan Azheri, 2008:134

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai ketiga aspek dalam *Triple Bottom Line*, sehingga akan diketahui kepentingan dari masing-masing

aspek dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan.

a. *Profit* (ekonomi)

Motivasi utama dari setiap kegiatan usaha yaitu mencari laba atau keuntungan, oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan oleh setiap pengelola perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Salah satu tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada para *shareholders*. Hal ini sekaligus bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap *shareholders*. *Profit* sendiri merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

b. *People* (sosial)

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, maka perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kepedulian. Selain itu perlu disadari bahwa operasional suatu perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik dalam makna positif maupun negatif. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagai kompensasi atas dampak yang diterima oleh masyarakat. Melalui paradigma *corporate image*, maka dengan sendirinya dimensi sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkup aktivitas dunia usaha itu sendiri. Dengan demikian pengelolaan perusahaan akan lebih santun dan arif terhadap *community relationship*-nya.

c. *Planet* (lingkungan)

Apabila aspek segala sesuatu berkaitan dengan *profit* dan *people* telah menjadi bagian suatu aktivitas dunia usaha, belum lengkap sebelum perusahaan memasukkan aspek lingkungan (*planet*) sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitasnya. Namun demikian perlu dipahami juga apa yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu jika perusahaan ingin eksis dan diterima untuk jangka panjang, maka segala aktivitas perusahaannya harus menyertakan tanggung jawabnya kepada lingkungan. (Wahyudi dan Azheri, 2008)

Pada tahun 2002 *Global Compact Initiative* menegaskan kembali tentang *triple P* sebagai tiga pilar CSR dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Kegiatan *Corporate Social Responsibility*
Sumber : Hardiansyah & Muhammad Iqbal dalam Azheri (2012:35)

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

9. Peraturan Mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR)

UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 antara lain diatur bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dengan memperhatikan kaptuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan lain yang menyinggung tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “*setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*”. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Seperti diketahui, *Corporate Social Responsibility* (CSR) milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU ini dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang relatif lebih terinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No:Per-05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dan hingga tatacara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

D. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Maka yang dimaksud program kemitraan BUMN dengan usaha kecil (Program Kemitraan) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian

laba BUMN. Berdasarkan peraturan ini, PKBL wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN, baik yang berbentuk perum maupun persero.

Dana yang digunakan dalam program kemitraan dan bina lingkungan ini sebagaimana dijelaskan pada Bab III Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/MBU/2007, bersumber dari :

1. Penyisihan laba BUMN setelah pajak yang nilainya maksimal sebesar 2% (dua persen);
2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
3. Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Secara konsep program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan BUMN tidak jauh berbeda dengan *best practices* CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktek CSR yang dilakukan oleh BUMN. Peran program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang dilakukan BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBLBUMN juga diharapkan mampu mewujudkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*), (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-*

growth). Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Selanjutnya, dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dijelaskan pada Bab III Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/MBU/2007 adalah digunakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dana program kemitraan
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
 - c. Beban Pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

2. Dana program bina lingkungan

a. Dana program bina lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan atau deposito yang terealisasi serta pendapatan yang lainnya.

b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana program bina lingkungan yang tersedia dapat disalurkan melalui Program Bina Lingkungan BUMN Pembina.

c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia diperuntukkan bagi Program Bina Lingkungan BUMN Peduli.

d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana program bina lingkungan tahun berikutnya.

e. Ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina:

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 5) Bantuan sarana ibadah;

6) Bantuan pelestarian alam;

f. Ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN peduli ditetapkan oleh Menteri.

Adapun mekanisme penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dijelaskan pada Bab IV pasal 12 Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/MBU/2007 adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian pinjaman dana program kemitraan:

a. Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat unit usaha;
- 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
- 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
- 4) Bidang usaha;
- 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
- 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);

7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.

b. BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan;

- c. Calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur dan mitra binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur dan mitra binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
 - e. BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi mitra binaan BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur lain.
2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh menteri.
 3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.

4. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN penyalur atau lembaga penyalur.

Dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan ini, diperlukan suatu penilaian dalam mengukur keberhasilan program, untuk itu diperlukan suatu indikator dalam mengukurnya. Sholichin (2008) menerangkan bahwa dalam pencapaian sasaran kerja yang optimal harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan tujuan-tujuan akhir yang dikehendaki dari sasaran tersebut; masalah-masalah yang dihadapi; modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; dan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Selain itu, Sholichin (2008:10) juga mengemukakan bahwa penentuan indikator keberhasilan pelaksanaan program yang ideal harus berprinsip pada lima hal, yaitu:

- a. Prinsip partisipatif, yaitu masyarakat yang akan memperoleh manfaat perencanaan harus berperan serta dalam prosesnya.
- b. Prinsip kesinambungan, artinya perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut untuk menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan sehingga tidak sampai terjadi kemunduran.

- c. Prinsip holistik, artinya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi (sektor) saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- d. Prinsip adaptif, artinya mengandung sistem yang dapat berkembang.
- e. Prinsip pluralistik, artinya bersifat terbuka dan demokratis.

Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut harus diidentifikasi secara cermat sebagai dasar untuk menetapkan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan program yang tepat, relevan, dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan, program, atau kegiatan.

Sholichin (2008:12) juga menyebutkan bahwa terdapat suatu indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program organisasi secara lebih mendalam yaitu sebagai berikut:

- a. *Input* (masukan)

Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi seperti manusia, informasi kebijakan, dan sebagainya.

- b. *Output* (keluaran)

Yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik maupun non fisik.

c. *Outcomes*(hasil yang dapat dimanfaatkan)

Yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung)

d. *Benefit* (manfaat jangka panjang)

Yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

e. *Impact* (dampak yang ditimbulkan)

Yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan program digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pengukuran dilakukan secara sistematis terhadap indikator-indikator yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian ini tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengelola masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan deskripsi untuk interpretasi data dan metode kualitatif untuk menganalisis masalah. Data deskripsi adalah metode interpretasi data dengan cara menggambarkan tanpa membuat kesimpulan dalam bentuk prediksi, manipulasi, atau penjelasan argumentatif, maupun pengendalian persepsi. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data tanpa menggunakan perkiraan dalam bentuk nilai atau angka, melainkan dalam bentuk bahasa dan kata-kata yang dilakukan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian.

Kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Dengan demikian maka penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui tentang penerapan konsep *triple bottom line* dalam program kemitraan dan bina lingkungan sebagai bentuk CSR pada PT Petrokimia Gresik.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2000:237), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu: pertama, penetapan fokus membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak. Kedua, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *triple bottom line* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR PT. Petrokimia Gresik :
 - a. Program kerja organisasi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
 - b. Alokasi dana dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
 - c. Sasaran atau target Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
 - d. Pendukung dan penghambat penerapan *triple bottom line* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (dari faktor internal maupun eksternal)
2. *Input, output, outcomes, benefit, dan impact* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Petrokimia Gresik

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini yang dimaksud adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang diteliti, maka lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah pada Kabupaten Gresik. Oleh karena Gresik adalah kota industri yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan yang patut diperhitungkan.

Sedangkan yang dimaksud situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Situs pada penelitian ini adalah perusahaan PT Petrokimia Gresik yang beralamat di Graha Sarana Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik. Perusahaan negara atau BUMN ini merupakan salah satu perusahaan yang bidang usaha utamanya adalah pupuk yang terbesar di Indonesia yang sudah diakui reputasinya dan tentu saja berperan banyak dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Peranan PT Petrokimia Gresik dalam proses pembangunan Indonesia adalah ikut berperan dalam penyedia pupuk terbesar di Indonesia yang termasuk sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

D. Jenis Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Bungin, 2001:128). Data primer

memiliki kelebihan yakni data ini mampu diolah sesuai dengan kehendak peneliti dalam kaitannya dengan kebutuhan data. Sedangkan kelemahannya adalah pengumpulan data ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dalam hal ini data primer diperoleh dari:

- a. PT Petrokimia Gresik, lebih tepatnya pada Departemen KBL (Kemitraan & Bina Lingkungan) PT Petrokimia Gresik.
 - b. Bapak Rochmad Purnomo, SE.MM. sebagai Kasi Akuntansi & Keuangan, Departemen KBL PT Petrokimia Gresik.
 - c. Bapak H.Ahmad Nadief sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik dibidang usaha petis.
 - d. Bapak Gatot sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik dibidang usaha bengkel sepeda motor.
 - e. Ibu Titik Siskandiati sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik dibidang usaha produktif.
2. Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer (Bungin, 2001:129). Data sekunder ini merupakan data yang mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian. Data sekunder dalam hal ini berupa artikel, dokumen dan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Gresik, data geografis Kabupaten Gresik, data kondisi sosial ekonomi Kabupaten Gresik, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:62) adalah langkah strategis untuk mendapatkan data. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak ditemukan melalui observasi (Stainback dalam Sugiyono, 2012:72). Kegiatan wawancara peneliti dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para informan yang terdiri atas Kasi Akuntansi & Keuangan Bagian Administrasi Keuangan pada Departemen KBL (Kemitraan & Bina Lingkungan) PT Petrokimia Gresik. Untuk informan dari para mitra binaan ada Bapak H.Ahmad Nadief sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik di bidang usaha Petis, Bapak Gatot sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik dibidang usaha bengkel sepeda motor, Ibu Titik Siskandiati sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik di bidang usaha keterampilan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2006:156). Peneliti mengamati kondisi lokasi dan situs

penelitian, pengamatan peneliti diawali oleh kondisi geografis di Kabupaten Gresik kemudian pengamatan yang lebih mendalam ke beberapa desa kawasan ring I yang paling dekat dengan perusahaan dan berhubungan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan bagaimana pola kerjasama yang dilakukan terhadap program yang diterapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mengabadikan berbagai data yang didapat dari situs penelitian, dokumentasi dalam penelitian (Arikunto, 2006:158), seperti pengarsipan segala dokumen terkait pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, menulis ulang wawancara dengan berbagai pihak terkait dan mengambil foto kondisi dan lokasi yang berhubungan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut. Melalui dokumentasi ini peneliti lebih mudah dalam penyusunan laporan skripsi karena data telah tersedia dan bisa langsung disajikan serta dianalisis.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri (Sugiyono, 2012:59-60). Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri, yaitu menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara langsung meluncur ke lapangan untuk menghimpun data dari apa yang akan diteliti. Peneliti secara langsung menghimpun data dari Departemen KBL PT Petrokimia Gresik, mendatangi mitra binaan PT Petrokimia Gresik dan masyarakat desa sekitar perusahaan untuk mewawancarai bagaimana pendapat tentang PKBL PT Petrokimia.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Dalam melakukan wawancara, peneliti harus menggunakan pedoman wawancara (terlampir) untuk mengarahkan penelitian dalam rangka mencari data yang diinginkan. Pedoman wawancara yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden yang aman hal ini digunakan sebagai petunjuk saat melakukan wawancara. Secara langsung peneliti mewawancarai staf Departemen KBL PT Petrokimia Gresik yaitu Bapak Rochmad, kemudian Bapak H. Ahmad dan Ibu Titik Siskandiati sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia, dan masyarakat desa sekitar perusahaan dengan pedoman wawancara yang berhubungan dengan PKBL yang nantinya berguna sebagai alat bantu untuk mengarahkan penelitian dalam rangka mencari data yang diinginkan.

3. Catatan lapangan (*field note*)

Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif. Peneliti mencatat apa saja yang penting dalam observasi lapangan untuk mudah mengingat apa saja yang terjadi di lapangan.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan Biklen (Moleong, 2006:248) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian. Penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan analisis data model interaktif (Miles dan Huberman dalam Idrus, 2009:148) dengan prosedur :

1. Reduksi data

Data lapangan yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dituangkan dalam uraian atau laporan yang

lengkap dan terinci. Laporan lapangan telah direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian mencari tema atau polonya.

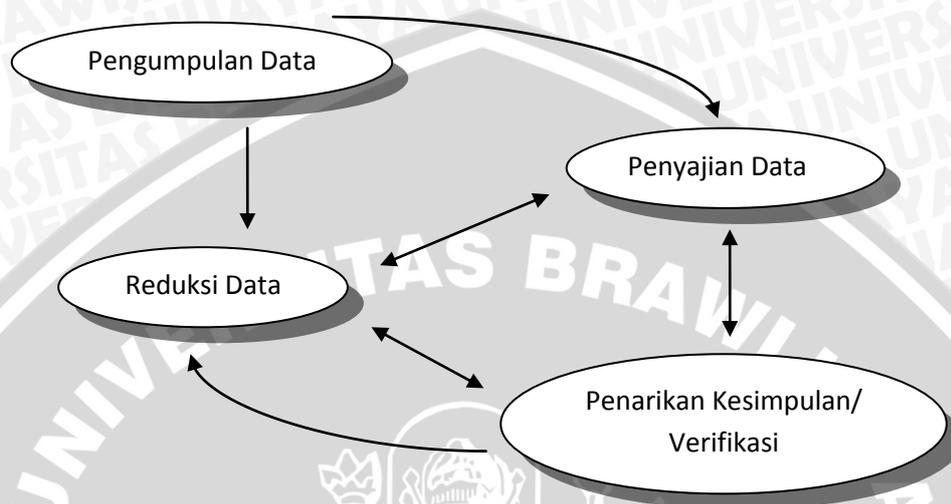
2. Penyajian data

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data lapangan yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan dapat ditarik kesimpulan.

Komponen-komponen analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
 Sumber: Miles dan Huberman, dalam Idrus (2009:148)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

a. Letak Geografis

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

2011 sebesar 1.270.351 jiwa, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 37.644 jiwa atau 2,9%. Dengan luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191,25/Km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/Km².

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Penduduk per Keluarga Menurut Kecamatan
Sumber : Gresik Dalam Angka 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk	Keluarga	Kepadatan	Rata-Rata Penduduk per Keluarga
1.	Wringinanom	62,62	70.734	21.224	1.130	3
2.	Driyorejo	51,30	102.213	28.680	1.992	4
3.	Kedamean	65,96	61.117	18.225	927	3
4.	Menganti	68,71	118.888	33.406	1.730	4
5.	Cerme	71,73	78.066	20.630	1.088	4
6.	Benjeng	61,26	66.157	19.135	1.080	3
7.	Balongpanggang	63,88	59.576	17.434	933	3
8.	Duduksampeyan	74,29	51.257	13.780	690	4
9.	Kebomas	30,06	101.526	27.133	3.377	4
10.	Gresik	5,54	93.659	25.235	16.906	4
11.	Manyar	95,42	108.784	28.414	1.140	4
12.	Bungah	79,49	66.200	17.541	833	4
13.	Sidayu	47,13	42.915	10.930	911	4
14.	Dukun	59,03	68.368	18.493	1.158	4
15.	Panceng	62,59	51.685	13.612	826	4
16.	Ujungpangkah	94,82	50.463	13.354	532	4
17.	Sangkapura	118,72	74.970	19.039	631	4
18.	Tambak	78,70	41.417	10.420	526	4
Jumlah/Total		1.191,25	1.307.995	356.685	1.098	4

c. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Gresik pada tahun 2012 dilihat dari Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp.19.409.867.960.000,- sedangkan Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku sebesar Rp.50.976.371.490 ribu rupiah. Adapun Struktur Ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2012 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2000 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,52%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 22,82%, dan Sektor Pertanian sebesar 7,83%. Demikian pula berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku juga didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,31%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,44%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,61%. Dengan demikian gambaran ekonomi Kabupaten Gresik adalah Daerah Industri dan Perdagangan dengan didukung Pertanian yang mantap. Tahun 2012 ditargetkan pendapatan daerah sebesar Rp.1.556.273.473.722,33 dan terealisasi sebesar Rp.1.650.603.336.995,55 sen atau 106,06 %. Pencapaian pendapatan daerah tersebut telah melebihi proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD 2011-2015 pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.1.331.991.080.000,- bahkan telah melampaui proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD 2011-2015 pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.1.574.186.023.000,-.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2011-2012
Sumber : Gresik Dalam Angka 2013

No	Sektor	2011	2012
1.	Pertanian	2,99	3,03
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	1,28	1,30
	1.2. Tanaman Perkebunan	4,15	4,05
	1.3. Peternakan	2,98	3,01
	1.4. Kehutanan	-	-
	1.5. Perikanan	4,45	4,47
2.	Pertambangan dan Penggalian	12,07	12,46
	2.1. Pertambangan Migas	16,60	16,62
	2.2. Pertambangan Non Migas	-	-
	2.3. Penggalian	2,93	2,94
3.	Industri Pengolahan	5,97	5,99
	3.1. Ind. Makanan, Minuman dan Tembakau	5,01	5,02
	3.2. Ind. Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	6,29	6,29
	3.3. Ind. Kayu dan Sejenisnya	3,54	3,55
	3.4. Ind. Kertas, Percetakan dan Penerbitan	6,51	6,54
	3.5. Ind. Kimia, Minyak Bumi, Karet dan Plastik	6,56	6,56
	3.6. Ind. Barang Galian non Logam, Kecuali Minyak Bumi dan Batubara	4,68	4,71
	3.7. Ind. Logam Dasar	6,14	6,22
	3.8. Ind. Barang dari Logam, Mesin dan Peralatan	7,98	8,03
	3.9. Ind. Pengolahan Lainnya	6,89	6,90
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,69	9,76
	4.1. Listrik PLN dan Non PLN	9,81	9,82
	4.2. Gas Kota	-	-
	4.3. Air Bersih	7,89	8,80
5.	Konstruksi	9,60	9,65
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,35	11,07
	6.1. Perdagangan	11,50	11,19
	6.2. Hotel	9,12	9,14
	6.3. Restoran	9,11	9,13
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7,57	7,22
	7.1. Angkutan	6,14	6,02
	a. Angkutan Rel	6,96	6,98
	b. Angkutan Jalan Raya	6,58	6,61
	c. Angkutan Laut	4,89	4,32
	d. Angkutan Penyeberangan	6,31	5,64
	e. Angkutan Udara	-	-
	f. Jasa Penunjang Angkutan	6,30	6,32
	7.2. Komunikasi	11,96	10,70
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,05	7,44
	8.1. Bank	11,86	9,77
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	6,95	12,96
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-
	8.4. Sewa Bangunan	6,62	6,65
	8.5. Jasa Perusahaan	5,12	5,14
9.	Jasa-jasa	6,95	6,95
	9.1. Pemerintahan Umum	7,31	7,32
	9.2. Swasta	6,85	6,84
	a. Jasa Sosial Masyarakat	6,58	6,52
	b. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	8,60	8,64
	c. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	6,84	6,85
Produk Domestik Regional Bruto		7,39	7,43

2. Gambaran Umum PT Petrokimia Gresik

a. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Beberapa perubahan status perusahaan :

1. Perusahaan Umum (Perum) : PP No. 55/1971
2. Persero : PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975
3. Anggota Holding PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) : PP No. 28/1997
4. Anggota Holding PT Pupuk Indonesia (Persero) : SK Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, nomor : AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012

PT Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 hektar berlokasi di Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.

b. Visi Misi & Budaya Perusahaan

1. Visi

“Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen”. Visi ini menegaskan komitmen dari semua jajaran Direksi dan karyawan PT Petrokimia Gresik untuk menjadikan pelanggan sebagai fokus

dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan menciptakan inovasi-inovasi produk dengan tidak mengesampingkan untuk melakukan efisiensi biaya sehingga tercipta produk yang berdaya saing di pasaran yang bisa memuaskan pelanggan.

Sejalan dalam memasuki era globalisasi dimana persaingan sangat ketat, maka dari kondisi ini masih sangat relevan jika menggunakan visi tersebut.

2. Misi

- a. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- b. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
- c. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

3. Budaya

- a. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- b. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
- c. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis
- d. Mengutamakan integritas di atas segala hal.
- e. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.

c. Logo Perusahaan



Gambar 4. Lambang PT Petrokimia Gresik

Sumber : www.petrokimia-gresik.com

PT Petrokimia Gresik memiliki lambang / logo, yaitu seekor kerbau berwarna kuning emas dan daun berwarna hijau berujung lima dengan huruf PG berwarna putih yang terletak di tengah-tengahnya.

Masing-masing lambang tersebut mengandung arti sebagai berikut :

1. Kerbau berwarna kuning emas
 - a. Dalam bahasa daerah (Jawa) adalah Kebomas, sebagai penghargaan kepada daerah di mana PT Petrokimia Gresik berdomisili, yaitu di wilayah kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. PT Petrokimia Gresik saat ini mempunyai areal seluas 450 hektar yang terletak di kecamatan Gresik, Manyar dan Kebomas.
 - b. Warna emas sebagai lambang keagungan.
 - c. Kerbau merupakan sahabat petani, yang dipergunakan oleh petani untuk mengolah sawah.

2. Kelopak daun hijau berujung lima
 - a. Daun berujung lima melambangkan kelima sila dari Pancasila
 - b. Warna hijau sebagai lambang kesuburan dan kesejahteraan
3. Huruf PG berwarna putih
 - a. PG singkatan dari Petrokimia Gresik
 - b. Warna putih sebagai lambang bersih dan suci

d. Kapasitas Produksi dan Jasa

1. Produk dan Kapasitas Produksi

Selaras dengan program pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, perusahaan berupaya mengembangkan pabrik sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dari 4.417.500 ton/tahun (tahun 2007) menjadi 6.175.800 ton/th. Sampai dengan tahun 2012, PT Petrokimia Gresik memiliki 23 pabrik yang terdiri dari:

- a. Pabrik Pupuk : 16 Unit
- b. Pabrik non pupuk : 7 Unit

Pada tahun 2012 kapasitas pabrik PT Petrokimia Gresik meningkat menjadi 6.175.800 ton/tahun, yaitu telah beroperasinya Pabrik Phonska IV berkapasitas 630.000 ton/tahun pada bulan April 2011 dan kapasitas pabrik Pupuk Fosfat/SP-36 menjadi 500.000 ton/tahun.

Sejak tahun 2005, PT Petrokimia Gresik telah mengembangkan pabrik pupuk organik bernama Petroganik sebagai wujud semangat untuk terus berinovasi dan kepedulian terhadap lingkungan dari seluruh elemen perusahaan. Pupuk Petroganik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pupuk berbahan kimia, memerlukan strategi pengembangan yang berbeda pula. Untuk menyesuaikan dengan kondisi tanah dan bahan baku yang terbatas pada masing-masing daerah, maka pengembangan pabrik dilaksanakan pada tiap daerah di seluruh wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan investor daerah.

Jumlah pabrik Petroganik yang sudah beroperasi sampai dengan Desember 2012 sebanyak 178 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas produksi masing-masing pabrik sebesar 10.000 ton/tahun. Jumlah pabrik Petroganik tahun 2012 bertambah 10 pabrik dari tahun 2011 sebanyak 168 pabrik. Sedangkan yang masih dalam tahap konstruksi sebanyak 27 pabrik. Selain menghasilkan dan memasarkan produk pupuk dan non pupuk, PT Petrokimia Gresik juga menawarkan berbagai bentuk jasa & pelayanan, antara lain meliputi : jasa pelabuhan, keahlian, fabrikasi, penelitian laboratorium, konstruksi & rancang bangun, pendidikan & latihan, dan lain-lain.

Tabel 5.Jumlah Pabrik PT Petrokimia Gresik & Kapasitas
Sumber : *Annual Report* PT Petrokimia Gresik 2012

Pupuk	Pabrik	Kapasitas/tahun	Tahun Beroperasi
Pupuk Urea	1	460.000 ton/tahun	1994
Pupuk Fosfat/SP-36	1	500.000 ton/tahun	2009
Pupuk ZA	3	750.000 ton/tahun	1972, 1984, 1986
Pupuk NPK (2.770.000 ton/tahun) Rincian :			
- Phonska I	1	450.000 ton/tahun	2000
- Phonska II & III	2	1.260.000 ton/tahun	2005, 2009
- Phonska IV	1	630.000 ton/tahun	2011
- NPK I	1	70.000 ton/tahun	2005
- NPK II	1	100.000 ton/tahun	2008
- NPK III & IV	2	200.000 ton/tahun	2009
- NPK Blending	1	60.000 ton/tahun	2003
Pupuk K ₂ SO ₄ (ZK)	1	10.000 ton/tahun	2005
Pupuk Petroganik	1	10.000 ton/tahun	2005
Jumlah pabrik/kapasitas	16	4.500.000 ton/tahun	
Non Pupuk	Pabrik	Kapasitas/tahun	Tahun Beroperasi
Amoniak	1	445.000 ton/tahun	1994
Asam Sulfat (100% P2O5)	1	550.000 ton/tahun	1985
Asam Fosfat (98% H2 SO4)	1	200.000 ton/tahun	1985
Cement Retarder	1	440.000 ton/tahun	1985
Alumunium Fluorida	1	12.600 ton/tahun	1985
CO2 Cair	1	16.600 ton/tahun	1994
HCl Hydrochloric Acid	1	11.600 ton/tahun	2005
Jumlah pabrik/Kapasitas	7	1.675.800 ton/tahun	
TOTAL PABRIK / KAPASITAS	23	6.175.800 TON/TAHUN	

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Penerapan konsep *triple bottom line* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR PT Petrokimia Gresik (lebih difokuskan pada Program Kemitraan)

a. Program kerja organisasi dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Bagi PT Petrokimia Gresik, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sudah merupakan kewajiban yang memang harus ditunaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. PT Petrokimia Gresik menyadari bahwa dalam menunjang keberlanjutan perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang dengan *stakeholder*, salah satunya yaitu hubungan dengan sosial kemasyarakatan dan lingkungan perusahaan, sebagai bentuk timbal balik kepada lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Sehingga hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat bukan sekedar retorika semata, melainkan sebagai pilar yang menjaga keberlanjutan perusahaan.

Adapun aspek hukum yang mendasari pelaksanaan PKBL antara lain UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Keputusan Menteri BUMN Nomor, Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan BUMN, Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No.007/LI.00.01/30/SK/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang struktur organisasi Direktorat SDM dan Umum PT Petrokimia Gresik, serta Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0243/TU.04.02/30/SK/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik.

1. Program Kemitraan

a. Kemitraan dengan usaha kecil

Industri kecil mempunyai peranan yang sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan industri secara keseluruhan dalam perekonomian nasional, karena mencakup hampir seluruh lapangan usaha baik yang ada di desa maupun di kota. Dalam hal ini, partisipasi BUMN perlu ditingkatkan untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan dengan usaha kecil dalam rangka untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Program Kemitraan di perusahaan berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam ketentuan

tersebut dijelaskan bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Dan minimal memenuhi kriteria kekayaan paling banyak Rp 200 juta - tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.

b. Pola-Pola Pembinaan

1) Pola Pembinaan Langsung

a. Pola Pembinaan Murni

Pengusaha kecil diberi pinjaman modal untuk biaya modal kerja atau investasi dalam rangka untuk meningkatkan usahanya.

b. Kemitraan / Penjaminan

Perusahaan bekerjasama dengan instansi / lembaga / koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.

2) Pola kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN

Pembina lainnya, misalnya dengan membentuk konsorsium.

Program ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dua atau lebih BUMN dalam melaksanakan pembinaan terhadap mitra binaan usaha kecil, mikro secara bersama-sama.

c. Penyaluran Dana Pinjaman

Dalam melakukan pembinaan, program yang dipilih PKBL Petrokimia Gresik disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil diantaranya masalah permodalan. Dalam masalah permodalan ini PKBL Petrokimia Gresik menyalurkan dana pinjaman kemitraan dengan skema angsuran selama maksimum 3 tahun. Tentu saja dalam penyaluran dana, tetap dilaksanakan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi.

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian diwujudkan dengan proses pemberian pinjaman yang mempergunakan konsep penilaian 5 C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of economy*, dan *Collateral*. Dalam proses pemberian pinjaman dilakukan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan mitra binaan potensial, pengajuan proposal pinjaman, survei, keputusan pinjaman, penyaluran pinjaman hingga monitoring pinjaman. Khusus aspek *collateral*, PKBL Petrokimia Gresik menggunakannya sebagai ‘pegangan’ agar terpenuhi aspek ikatan moral, bukan sebagai ‘*second way out*’ dari pinjaman yang diberikan. Sedang akuntabilitas tinggi diwujudkan PKBL Petrokimia Gresik dalam pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan kualitas usaha mitra binaan. Artinya, PKBL Petrokimia Gresik sangat mempertimbangkan ‘daya ungkit’

pinjaman yang diberikan dibandingkan sekedar menyalurkan pinjaman.

Pemberian pinjaman modal kerja diberikan untuk sektor usaha tani yang meliputi sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan dan sektor perikanan. Disamping usaha tani juga mengutamakan mitra binaan non usaha tani yang sudah memasuki tahap lanjutan dan wilayah usahanya berada disekitar wilayah usaha perusahaan. Mekanisme pemberian pinjaman modal kerja dimulai dari seleksi pemberian formulir proposal, survei lapangan, evaluasi hasil survei, pengajuan usulan persetujuan kepada Direksi, dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman serta penyaluran pinjaman.

d. Pendidikan dan Pelatihan Mitra Binaan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini sifatnya hibah dan diberikan kepada mitra binaan PT Petrokimia Gresik secara bergantian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada mitra binaan agar mitra binaan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mitra binaan.

UKM memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian nasional. Persoalan yang dihadapi oleh UKM secara umum adalah kualitas pengelolaan usaha masih belum memenuhi kualifikasi untuk masuk pada persaingan yang lebih luas. UKM

memiliki kecenderungan menguasai pasar setempat dan tradisional. PT Petrokimia Gresik memiliki target terhadap mitra binaan agar bisa lebih tumbuh dan berkembang. Kriteria sasaran yang digunakan PKBL PT Petrokimia Gresik dalam melakukan pembinaan disesuaikan dengan PER-05/MBU/2007. Dalam hal ini misinya adalah mengantarkan mitra binaan agar bisa melewati omset Rp 1 Milyar per tahun.

Dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan PT Petrokimia bekerjasama dengan pihak tertentu. Dalam pelatihan teknis dan manajemen agro PT Petrokimia Gresik bekerjasama dengan Mitra Mandiri Manajemen. Fokus pelatihan khusus untuk agro terletak pada budidaya dan manajemen usaha tani. Khusus untuk pelatihan manajemen bisnis dibidang industri, perdagangan, dan jasa PT Petrokimia Gresik bekerjasama dengan Padmanaba Konsultrama yang materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan mitra binaan.

Kegiatan Pendidikan/Pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan manajemen sederhana. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada mitra binaan agar ketrampilan yang telah diperoleh ini dapat dipraktekkan dalam menjalankan usahanya, sehingga mitra binaan dapat memisahkan antara kekayaan

sendiri dengan kekayaan hasil usahanya dan dapat diketahui seberapa besar peningkatan/ perkembangan usaha yang telah dilaksanakan;

2. Pelatihan komputerisasi akuntansi toko pertanian bagi mitra binaan;
3. Pelatihan kiat sukses mengelola bisnis UKM dan konsultasi bagi pengelola kios pertanian;
4. Pelatihan pengembangan ketrampilan berkomunikasi, negosiasi dan etiket dalam berbisnis bagi mitra binaan sektor perdagangan;
5. Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha mitra binaan bagi mitra binaan pengelola kios pertanian;

Beberapa mitra binaan yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ini mengaku bahwa pembinaan dan dukungan yang diberikan oleh PT Petrokimia Gresik sangat bermanfaat bagi usaha yang dijalankan. Haji Nadief salah satu mitra binaan PT Petrokimia Gresik menyadari bahwa selama menjadi mitra binaan, dukungan dan pembinaan berupa pelatihan pengelolaan bisnis sangat membantu perjalanan usahanya. Tidak hanya Haji Nadief, Toko Otak-otak Bandeng khas Gresik milik keluarga Bu Muzanah yang tadinya adalah toko sederhana di depan tempat produksi. Keikutsertaan pada program kemitraan membuat toko ini membuka tempat penjualan di lahan yang lebih luas dan

memakai konsep toko modern yaitu dengan sistem swalayan. Tidak hanya berhenti pada membenahan toko, pengelola usaha juga melakukan banyak inovasi produk seperti pembuatan abon duri yang berasal dari limbah duri bandeng. Berbagai inovasi produk dan kemampuan untuk menjaga kualitas membuat para konsumen semakin loyal dan berkembang jumlahnya.

Tabel 6. Perkembangan jumlah mitra binaan 2012
Sumber : Sustainability Report 2012

PERKEMBANGAN JUMLAH MITRA BINAAN Total Development Partners					
No.	URAIAN Description	Realisasi / Realization 2011		Realisasi / Realization 2012	
		Jumlah Unit MB Total Unit MB	Nilai (Rp) Amount (Rp)	Jumlah Unit MB Total Unit MB	Nilai (Rp) Amount (Rp)
1	Industri Industry	24	692.500.000	20	748.000.000
2	Perdagangan Trading	90	3.226.500.000	138	5.232.500.000
3	Pertanian Agriculture	349	22.844.546.000	399	32.333.417.500
4	Peternakan Livestock	105	12.311.900.000	159	18.928.600.000
5	Perkebunan Plantation	13	1.657.500.000	22	2.623.700.000
6	Perikanan Fishery	8	906.500.000	14	1.217.300.000
7	Jasa Service	3	65.000.000	4	110.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Development Fund		-	4.941.177.600	-	6.603.156.335
TOTAL		592	46.645.623.600	756	67.796.673.835

e. Pameran dan Promosi

Persoalan yang mendasar yang dihadapi UKM terutama bidang kerajinan dan produksi adalah keterbatasan akses pasar. PT Petrokimia Gresik sebagai pembina UKM mencari jalan keluar, dan salah satunya dengan menggunakan media pameran sebagai sarana promosi. Mengadakan pameran dan promosi yang dimaksudkan agar hasil produk binaan dapat dikenal oleh masyarakat luas dan dapat terjadi pembelian baik dalam skala

kecil maupun besar serta untuk menumbuhkan sinergi antar pengusaha kecil mitra binaan.

Memang tidak bisa dipungkiri semua mitra binaan tentu ingin diikutkan dalam pameran untuk memperluas pasarnya. Tapi karena keterbatasan dana, maka dilakukanlah seleksi yang cukup ketat pada mitra binaan yang akan diikutkan dalam pameran. Diantara penilaiannya didasarkan pada kualitas serta pengalaman melayani pasar. Bagi mitra binaan yang memiliki produk dengan kualitas pasar nasional akan diikutkan pada pameran tingkat nasional. Begitu pula untuk seleksi mengikuti pameran tingkat regional.

Kegiatan pameran yang telah dilaksanakan dalam tahun 2012 sebagai berikut :

1. Pameran NU Expo 2012 di Surabaya
2. Festival Kesenian Pesisir Utara di Gresik
3. Pameran Hari Kartini 2012 di Bali
4. *The 14th Jakarta International Handicraft Trade Fair* di Jakarta
5. Pameran Batik Bordir & Aksesoris 2012 di Surabaya
6. *The 4th Super Food Expo* di Jogjakarta
7. *The 3rd Jogja TITex* 2012 di Jogjakarta
8. Pameran Produk unggulan Daerah, UMK & Koperasi dan PKBL 2012 di Surabaya

9. Pameran HUT PT Petrokimia Gresik di Gresik
10. *Agrifood Fair* 2012 di Gresik
11. Expo Produk Unggulan Mitra Binaan BUMN di Surabaya
12. Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED) di Jogjakarta
13. Pameran *International Trade (I-trade)* 2012 di Malaysia
14. Pameran Craфина 2012 di Jakarta
15. Pupuk Kaltim Expo 2012 di Bontang

f. Hibah Alat Produksi

Peningkatan produktivitas sektor pertanian bisa dicapai dengan penggunaan teknologi sebagai alat bantu kerja. PKBL Petrokimia Gresik memiliki program bantuan hibah alat produksi bidang pertanian / peternakan, dengan beberapa pertimbangan :

1. Penerima hibah alat produksi adalah kelompok usaha tani / ternak yang telah memiliki kredibilitas sebagai mitra binaan dengan kategori baik.
2. KBL akan melakukan survei mengenai kebutuhan terhadap alat pada kelompok yang dianggap layak sebagai penerima hibah.
3. KBL Petrokimia Gresik akan memutuskan berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan dana.

Hibah alat produksi biasanya berupa alat-alat yang membantu para petani dalam proses produksinya, antara lain :

1. Mesin *hand tractor*, diberikan kepada kelompok tani untuk pengolahan tanah.
2. Mesin *power sprayer*, diberikan kepada kelompok tani yang digunakan sebagai pengganti hand sprayer.
3. Mesin *power thresher* (perontok padi), diberikan kepada kelompok tani untuk membantu efisiensi waktu pasca panen.
4. Mesin pencacah rumput, diberikan kepada kelompok peternak yang digunakan membantu proses pemotongan rumput untuk pembuatan pakan ternak.

b. Alokasi dana dan sumber daya lain dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

a) Program Kemitraan

Realisasi penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Tahun 2012 mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan Tahun 2012. Realisasi Penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2012 mencapai sebesar Rp 61.193.517.500 dan ini meningkat 40% dibandingkan dengan RKA tahun 2011 yaitu Rp 41.704.446.000. PKBL PT Petrokimia Gresik meningkatkan volume kegiatan penyaluran dengan menambah dana yang disalurkan berasal dari bagian laba dan penerimaan angsuran dari mitra binaan.

Penggunaan dana pinjaman modal kerja untuk masing-masing sektor sebagai berikut :

a. Sektor Industri

Realisasi penggunaan dana di tahun 2012 untuk Sektor Industri sebesar Rp 748.000.000 atau sebesar 51,92% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 1.440.605.00, menyesuaikan dengan proposal pengajuan pinjaman dari mitra binaan.

b. Sektor Perdagangan

Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Perdagangan sebesar Rp 5.232.500.000 atau sebesar 107,39% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 4.872.572.000.

c. Sektor Pertanian

Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Pertanian sebesar Rp 32.333.417.500 atau sebesar 159,26% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 20.302.383.000. Tingginya realisasi ini disebabkan mitra binaan tahap lanjutan telah melakukan pelunasan karena sudah memasuki musim tanam dan adanya pemberian pinjaman modal kerja untuk mitra binaan baru kelompok usaha tani.

d. Sektor Peternakan

Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Peternakan sebesar Rp 18.928.600.000 atau sebesar 171,22% bila dibandingkan

dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 11.055.081.000. Tingginya realisasi ini disebabkan sektor peternakan terutama peternakan sapi potong dikembangkan, sehingga kotoran sapi menjadi pendukung bahan baku industri pupuk organik/Petroganik dan mendukung penyediaan daging sapi.

e. Sektor Perikanan

Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Perikanan sebesar Rp 1.217.300.000 atau sebesar 153,36% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 793.763.000.

f. Sektor Perkebunan

Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Perkebunan sebesar Rp 2.623.700.000 atau sebesar 143,68% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 1.826.110.000. Tingginya realisasi ini untuk mendukung swasembada gula di Jawa Timur dengan meningkatkan jumlah mitra binaan sektor perkebunan yaitu petani tebu murni yang belum menjadi mitra binaan BUMN lain dan tidak terikat pinjaman oleh pihak manapun.

g. Sektor Jasa

Realisasi penggunaan dana di tahun 2012 untuk Sektor Jasa sebesar Rp 110.000.000,00 atau sebesar 35,00% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 314.255.000,00.

h. Pembinaan/Hibah

Di tahun 2012, realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembinaan berupa pelatihan dan pameran/promosi mitra binaan mencapai Rp6.603.156.335 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER – 05/MBU/2007 pasal 11 ayat 1 c.2.

i. Pameran/Promosi

Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pameran/ promosi sebesar Rp904.486.335 atau sebesar 22,28% dari RKA Tahun 2012 sebesar Rp 4.060.447.000.

j. Bantuan Pendidikan/Pelatihan

Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan/ pelatihan sebesar Rp 5.698.670.000 atau sebesar 93,56% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 6.090.715.000.

c. Sasaran atau target Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

PKBL PT Petrokimia Gresik telah melakukan aksi yang nyata dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan, yang semuanya bermuara pada pemenuhan hak hidup masyarakat yang lebih sejahtera baik langsung maupun tidak langsung. Dua aksi nyata yang dilakukan Departemen KBL Petrokimia Gresik untuk mengatasi kesenjangan,

yaitu dengan : 1) melakukan pengembangan usaha kecil dan mikro melalui program kemitraan, dan 2) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bina lingkungan. PKBL PT Petrokimia Gresik berkomitmen penuh untuk menjalankan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha kecil agar memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan, dengan memperluas akses usaha kecil yang tidak *bankable* pada permodalan usaha. Berbagai sektor sasaran PKBL PT Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut :

1. Industri

Industri yang dimaksud adalah usaha yang melakukan proses perubahan bentuk baik itu masal pengolahan masal maupun kerajinan. Perbedaan antara industri pengolahan dengan industri kerajinan terletak pada peran manusia, yang mana industri kerajinan sangat ditentukan unsur manusia dalam proses pengolahannya. Mayoritas adalah usaha / industri batik, industri krupuk dan industri petis. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa alokasi dana untuk industri pengolahan lebih diarahkan pada industri yang berlokasi di Gresik dan mendukung pertumbuhan industri kerajinan khas daerah. Kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan yang ada di sekitar Gresik, dilatarbelakangi alasan historis yaitu daerah Gresik sebagai daerah industri baik kecil, menengah, maupun besar. Di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dikenal

dengan sentra usaha produksi petis. Bagi Haji Nadief petis merupakan sumber penghasilan keluarga, dan telah memberikan hasil yang nyata. Petrokimia memberikan peluang kepada Haji Nadief untuk tumbuh selama menjadi mitra binaan PT Petrokimia Gresik. Haji Nadief menerima beberapa manfaat salah satu manfaat yang diperoleh adalah pembiayaan modal kerja.

2. Perdagangan

Mitra binaan dengan kategori perdagangan adalah usaha yang mendapatkan nilai tambah dari perubahan tempat dan waktu. Ciri usaha perdagangan lainnya tidak terjadi perubahan bentuk dari saat masuk dan keluar (transaksi pembelian/penjualan). Sehingga lokasi usaha perdagangan akan mengikuti pasar potensial yang menjadi sasarannya. Bila usaha perdagangan yang menjual produk kebutuhan pertanian, maka akan berlokasi di sekitar daerah pertanian. PKBL PT Petrokimia Gresik memandang strategis posisi usaha perdagangan karena ketersediaan barang akan menentukan kegiatan usaha lainnya. Alokasi dana untuk perdagangan terbesar adalah kios pertanian, dengan mempertimbangkan hubungan bisnis antara PT Petrokimia Gresik dengan mitra binaan. Bapak Suwono yang mengusahakan Kios Tani Mulyo juga mengakui kelebihannya untuk berusaha dan berinovasi akibat pengaruh binaan kemitraan Petrokimia Gresik. Pinjaman lunak yang diperolehnya dari PKBL PT. Petrokimia Gresik dipergunakan untuk merenovasi toko dan

membangun gudang sehingga memungkinkan perputaran stok lebih baik. Menurut Pak Suwono, semenjak bergabung menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik, banyak diperolehnya kemudahan terutama dari sisi permodalan, pembibitan serta pembinaan. Suwono merasa semakin mantap melaksanakan pertanian organiknya yang dirintis selama ini. Pak Suwono memang tidak hanya menjual produk / sarana produksi pertanian tetapi juga membuat demoplot pengelolaan pertanian hijau dan memperkenalkan pupuk cair nabati pada masyarakat.

3. Pertanian dan Perkebunan

Besarnya kebutuhan konsumsi gula domestik tidak diimbangi dengan kemampuan/kapasitas industri gula lokal. Kementerian Pertanian merevisi target produksi gula pada tahun ini menjadi 2,6 juta ton dari sebelumnya 4,4 juta ton dan target produksi gula pada 2014 yang sebelumnya 5,7 juta ton diturunkan menjadi 3,1 juta ton. Walaupun gula masuk sebagai komoditas strategis yang menjadi perhatian pemerintah, tetapi sektor lembaga keuangan formal memiliki keterbatasan untuk melakukan pembiayaan langsung pada petani. Celah ini yang dimanfaatkan oleh PKBL PT Petrokima Gresik untuk menyalurkan bantuan pada sektor perkebunan tebu. PKBL PT Petrokima Gresik memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang dikenal sebagai pemasok tebu dengan penyediaan sarana pertanian. Penyaluran bantuan tersebut memberikan ruang

kepada petani untuk memenuhi kebutuhannya agar mampu membudidayakan pertanian secara tepat. Menjaga tingkat rendemen pada hasil tanaman menjadi ukuran keberhasilan budidaya tebu, dan hanya bisa dicapai dengan melakukan budidaya dengan benar. Pinjaman dana kepada sektor pertanian berbeda dengan sektor industri dan perdagangan, dimana pada sektor pertanian lebih diarahkan pada penyaluran secara berkelompok dan dengan pola angsuran bayar panen dengan pola yang dipilih menyesuaikan dengan siklus usaha pertanian (hasil diperoleh setelah panen). Sebagai BUMN yang berada di sektor pertanian, tentu banyak kelompok pertanian yang berada dalam binaan PKBL Petrokimia Gresik. Salah satu kelompok tani itu adalah kelompok Mekar Sari di Kepanjen, Kabupaten Malang yang berfokus pada bagaimana menghasilkan tebu dengan kuantitas lebih berat untuk pemenuhan standar penerimaan tebu yang akan disalurkan pada PG Kebon Agung dan PG Krebbe. Tanaman tebu adalah tanaman yang sangat menginginkan banyak air, angin (penjagaan kelembaban) dan api (sinar matahari untuk fotosintesis). Adanya kelompok tani sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan budidaya dengan menjadi penghubung antara petani dengan pihak lembaga penyedia dana yaitu PKBL PT Petrokimia Gresik. Pertanaman tebu yang sangat intensif modal memang memerlukan dukungan lebih dulu dalam penyiapan lahan dan saprodi. Salah satu kunci sukses program

kemitraan PT. Petrokimia Gresik adalah peran kios pertanian sebagai penjamin para petani. Salah seorang pemilik kios pertanian yang sukses adalah Bapak Sarno. Pak Sarno yang berlatar belakang Sarjana Pertanian pula menyatakan ada beberapa pertimbangan yang harus dipahami untuk melaksanakan metode ini.

- a. Perlu adanya efisiensi lahan dan saprodi : umumnya para petani mempunyai luas lahan kurang dari 1 ha sehingga untuk memudahkan pembinaan dan penyaluran saprodi, harus dilakukan berkelompok.
- b. Pembinaan yang efektif : pada pola pembinaan harus menempatkan petani sebagai subyek, harus memberikan bukti dan tidak menggurui.
- c. Proses inovasi bidang pertanian akan lebih mudah terjadi apabila ada kelompok yang mendukung. Perubahan dalam cara budidaya pertanian akan lebih menarik minat petani apabila petani memperoleh sumbangan pikiran, nasehat dan perhatian rekan sekelompok.

4. Peternakan

Sektor peternakan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan protein hewani manusia. PKBL PT Petrokima Gresik menilai adanya peluang usaha di sektor peternakan akan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk peningkatan usaha. Kebijakan pemerintah yang mendorong peternak lokal untuk melakukan pengembangan usaha

disikapi oleh PKBL PT Petrokima Gresik dengan memberikan pinjaman kepada kelompok peternak di sentra sapi dengan komposisi yang lebih besar dibandingkan kelompok peternakan lainnya. Hal ini dalam rangka mendukung program pemerintah meningkatkan daya suplai daging sapi. Di desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk terdapat peternak sapi yang menjadi binaan PKBL Petrokimia Gresik, peternak-peternak ini tergabung dalam kelompok LMDH Makmur Jaya. Bapak Purwoko selaku ketua kelompok LMDH Makmur Jaya dan juga lurah desa Bareng selalu berusaha agar anggota kelompoknya lebih makmur dengan cara meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya hidup. Pak Purwoko melihat pemanfaatan kotoran sapi dapat menjadi alat menurunkan biaya hidup. Hal ini dikemukakannya pada PKBL Petrokimia dan mendapatkan sambutan pembinaan teknis sehingga dapat dibangun reaktor biogas. Pada saat ini instalasi biogas diletakkan di dekat kandang sapi dan dapat memasok energi untuk 15 rumah tangga. Pemanfaatan limbah kotoran sapi ternyata signifikan mengurangi pengeluaran untuk energi dan pupuk pertanian.

5. Perikanan

Budidaya ikan air tawar adalah salah satu usaha perikanan yang sedang tumbuh di masyarakat. Banyaknya jenis air tawar yang telah dapat dilakukan pembudidayaannya, baik pembenihan maupun

pembesarannya. PKBL PT Petrokima Gresik menilai sektor perikanan masih memiliki prospek usaha, yang pasti membutuhkan dukungan permodalan usaha untuk tumbuh. Pinjaman yang diberikan ke sektor perikanan pada kelompok peternak ikan. Kebijakan PKBL PT Petrokima Gresik menyalurkan dana pinjaman pada sektor perikanan darat karena diperlukan produk substitusi untuk produk perikanan laut. Pasokan ikan dari laut menjadi terhambat karena over fishing serta cuaca yang makin sulit diprediksi. Pergeseran pola pasokan ikan pada perikanan darat memberikan ruang pada pertumbuhan usaha di masa yang akan datang. Jumlah kelompok perikanan darat (tawar dan payau) yang ikut sebagai mitra binaan belum banyak tetapi menangkap peluang makin meningkatnya peran usaha sektor perikanan darat. Kabupaten Gresik sebagai daerah pesisir mempunyai banyak usaha perikanan, salah satunya adalah Bapak Suparto yang mempunyai usaha budidaya tambak bandeng, vannamei dan nila. Budidaya ikan tidaklah mudah, Pak Suparto harus menghadapi serangan hama penyakit namun Pak Suparto tidak putus asa tetapi berusaha terus dengan mengembangkan sistem perikanan terpadu, mina padi. Ternyata sistem mina padi lebih menguntungkan karena menurutnya tidak perlu memakai pestisida beracun pada perairan karena ikan dapat berfungsi sebagai predator hama tanaman, sawah tetap dalam keadaan berair dan sumber air tidak tercemar. Suparto menyatakan,

dukungan dana dan pengetahuan selama ia bergabung sebagai mitra pinjaman lunak PKBL PT Petrokimia Gresik sangat berarti baginya untuk senantiasa mengembangkan inovasi dan eksperimen yang ada dalam benak pemikirannya.

6. Jasa

Yang dikategorikan sektor jasa adalah usaha yang tidak ada barang fisik yang dipertukarkan antara penyedia dengan pengguna jasa. Pengguna jasa hanya menikmati layanan yang diberikan dengan membayar sejumlah uang. Sektor ini masih prospektif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang telah berkembang dari kebutuhan primer mengarah pada kebutuhan tersier. PKBL PT Petrokima Gresik menyalurkan dana pinjaman ke sektor jasa dengan analisis bisnis maupun risiko yang ada didalamnya. Sektor jasa ini berupa usaha bengkel sepeda motor milik Bapak Gatot di Desa Roomo Kabupaten Gresik.

d. Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) (dari faktor internal maupun eksternal)

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik dengan beberapa mitra binaannya dapat diidentifikasi beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan

program tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik :

- 1) Adanya komitmen dari PT Petrokimia Gresik yang tinggi terhadap terlaksananya CSR pada penerapan GCG yang berujung dengan dilaksanakannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
- 2) Kebijakan internal PT Petrokimia Gresik untuk mengadakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
- 3) Program dan strategi PT Petrokimia Gresik dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
- 4) Mitra binaan dari beberapa sektor sebagai objek / sasaran PKBL PT Petrokimia Gresik memiliki tingkat responsifitas yang tinggi dalam menerima pembinaan dari PT Petrokimia Gresik.
- 5) Adanya komunikasi dua arah yang baik antara PT Petrokimia Gresik dan mitra binaannya.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik dengan beberapa mitra binaannya dapat diidentifikasi beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan program tersebut. Berikut adalah beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik, yang secara khusus masih terkait dengan masalah yang dihadapi oleh mitra binaan :

- 1) Kemampuan SDM pengelola usaha rendah, sehingga kurang adanya inovasi untuk meningkatkan daya saing produk.
- 2) Kesulitan dalam pemasaran yang dihadapi oleh mitra binaan karena persaingan usaha dan lingkup pemasaran produk yang terbatas.

2. *Input, output, outcomes, benefit, dan impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Petrokimia Gresik

a. *Input* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

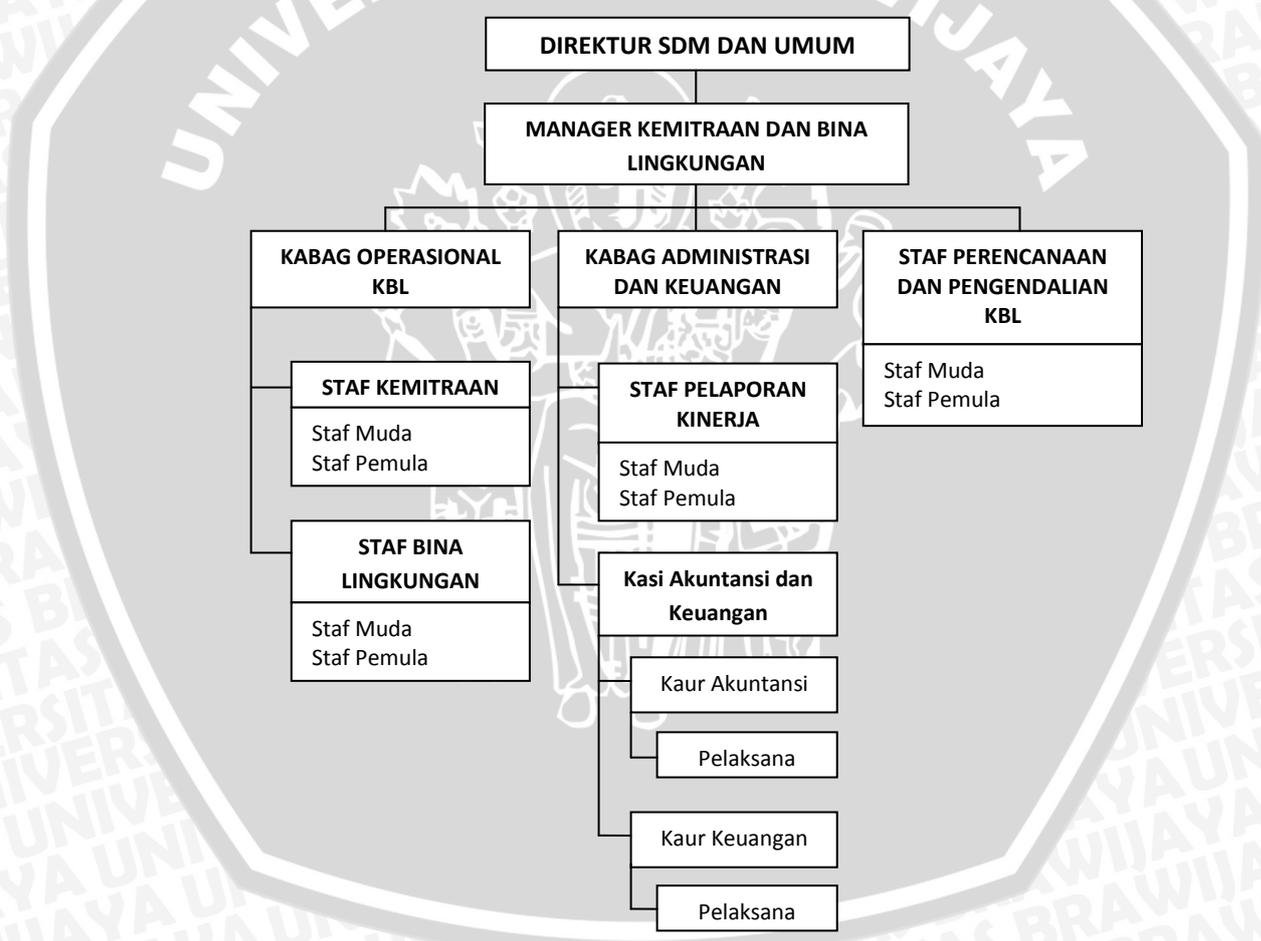
Menurut Solichin (2008:12) *input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi seperti manusia, informasi kebijakan, dan sebagainya. Adapun *input* dari PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai berikut.

1) Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang /dana yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Sehingga suatu program akan terhambat pelaksanaannya atau bahkan tidak terlaksana apabila tidak tersedia dana yang mencukupi. Oleh karena itu, sumber *input* berupa dana merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan baik dalam penerimaannya maupun pengelolaannya.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah *asset* bagi suatu organisasi yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam terwujudnya tujuan suatu organisasi. SDM yang dimaksud dalam program ini adalah seluruh karyawan yang tergabung dalam Departemen KBL PT Petrokimia Gresik. Berikut struktur organisasi Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan :



Gambar 5. Struktur organisasi Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sumber : Laporan manajemen PKBL

b. Output berupa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan nyata PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Menurut Solichin (2008:12) *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik maupun non fisik. PKBL PT Petrokimia Gresik diharapkan memberi kontribusi positif kepada masyarakat terutama disekitar wilayah usaha perusahaan baik berupa pinjaman kemitraan, pembinaan pelatihan dan bantuan bina lingkungan. Pembinaan mitra binaan dilakukan untuk membekali kemampuan usaha sehingga diharapkan usaha dapat berkembang dengan baik dan mampu mengembalikan dana pinjaman kemitraan. Penggunaan dana bina lingkungan dimaksudkan juga untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan industri untuk mendukung kelangsungan usaha perusahaan.

c. Outcomes dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Solichin (2008:12) *outcomes* (hasil yang dapat dimanfaatkan) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung). Melalui kegiatan PKBL PT Petrokimia Gresik, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi Perusahaan

Bagi PT Petrokimia Gresik, terlaksananya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk kinerja yang diperlihatkan secara nyata sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

2) Bagi Masyarakat

Melalui program kemitraan, masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah akan mudah mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga yang ringan untuk pengembangan usahanya, selain itu melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan, para mitra binaan akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kemampuan / skill mereka dalam berwirausaha. Sedangkan melalui kegiatan pameran, produk-produk dari mitra binaan akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk program bina lingkungan, masyarakat dapat secara cuma-cuma mendapatkan bantuan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, bantuan bencana alam dan bantuan lain untuk masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh para mitra binaan PT Petrokimia Gresik di bawah ini.

- a. Bapak H.Ahmad Nadief sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik dibidang usaha petis. Petrokimia memberikan peluang kepada Haji Nadief untuk tumbuh selama menjadi mitra binaan PT Petrokimia Gresik. Haji Nadief menerima beberapa manfaat “Salah satu manfaat yang saya peroleh adalah pembiayaan modal

kerja. Antisipasi terhadap kenaikan bahan akibat hukum pasar bisa disiasati dengan membeli persediaan lebih banyak, dan itulah yang membutuhkan banyak modal”. Bagi Haji Nadief petis merupakan sumber penghasilan keluarga, dan telah memberikan hasil yang nyata. “Saya bisa menyekolahkan 3 anak sampai lulus di bidang kesehatan, dua kali naik haji, dan sampai saat ini bisa hidup. Semuanya hasil usaha produksi petis” tukas Haji Nadief saat diwawancarai pada hari Kamis 17 April 2014, di tempat produksi petisnya.

- b. Bapak Gatot sebagai Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik dibidang usaha jasa bengkel motor. “Awalnya saya tidak berpengalaman mengenai mesin sepeda motor, namun setelah mengikuti pelatihan dengan materi teknisi sepeda motor yang diadakan oleh PT Petrokimia Gresik saya memahami dan memiliki keahlian mengenai mesin sepeda motor. Berbekal ilmu yang didapat dari pelatihan, saya membuka bengkel sepeda motor dengan menjadi mitra binaan PT Petrokimia Gresik”. “Dengan mengembangkan usaha ini saya bisa membuka lapangan pekerjaan baru, dengan mempunyai dua orang mekanik di bengkel” tambahnya. Hasil wawancara pada hari Kamis 17 April 2014.

d. *Benefit* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Benefit atau manfaat jangka panjang yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan (Solichin, 2008:12). Adapun manfaat jangka panjang yang diharapkan dari PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai berikut.

1) *Benefit* dari Program Kemitraan

1. PT Petrokimia Gresik diharapkan mampu mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi UKM di wilayah usahanya.
2. PT Petrokimia Gresik diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha untuk masyarakat.
3. PT Petrokimia Gresik diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga dapat meningkatkan derajat perekonomian daerah maupun nasional.
4. PT Petrokimia Gresik diharapkan mampu menjadikan industri UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
5. PT Petrokimia Gresik diharapkan mampu mengoptimalkan kapasitas dan ketahanan pelaku UKM melalui pelatihan dan pembinaan dengan pembentukan pola berpikir yang kreatif, inovatif, mandiri, dan tangguh.

e. *Impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Menurut Solichin (2008:12) *impact* (dampak yang ditimbulkan) yaitu pengeruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Adapun *impact* dari pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai berikut.

1) Dampak Positif

- a. Memperlancar perputaran usaha mitra binaan karena dengan bertambahnya modal kerja pembelian bahan baku/bibit/barang menjadi mudah.
- b. Meningkatkan hasil usaha mitra binaan karena pembelian bahan baku dengan cara tunai sehingga harga pembelian bahan baku lebih murah dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil usaha.
- c. Karena hasil usaha meningkat maka taraf hidup mitra binaan meningkat.
- d. Meningkatkan perkembangan usaha mitra binaan seperti aset dan omzet karena dengan bertambahnya dana mitra binaan dapat memiliki modal yang lebih besar dari sebelumnya.
- e. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dapat meningkatkan citra positif PT Petrokimia Gresik di mata masyarakat, sehingga memperkuat “*brand*” perusahaan serta

masyarakat semakin mengenal dan memahami berbagai produk dan jasa dari PT Petrokimia Gresik.

2) Dampak Negatif

- a. Pada program kemitraan, sejumlah masyarakat cenderung beranggapan bahwa pinjaman dana yang diberikan oleh PT Petrokimia merupakan dana bantuan dari pemerintah sehingga kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman masih rendah.
- b. Peminjaman modal usaha cenderung membuat ketergantungan pada sebagian masyarakat sekitar perusahaan semakin tinggi.

C. Pembahasan

Good Governance adalah sebuah paradigma yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya dan salah satu prakteknya adalah dalam melaksanakan pembangunan yang ada di negara ini. Dengan melaksanakan konsep tersebut maka suatu pemerintahan akan dikatakan telah melakukan pembangunan yang baik dan benar karena ketiga aktor yang ada yaitu pemerintah, sektor swasta (dunia bisnis) dan masyarakat telah ikut andil dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan dilaksanakannya *Good Governance* tersebut, diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara ketiganya yang nantinya akan dapat mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Diharapkan setiap aktor yang ikut serta memiliki peran yang penting sehingga semua aktor memiliki peran yang sama yaitu sama-sama pentingnya. Dengan demikian

maka tidak ada perbedaan dalam melaksanakan peran masing-masing. dalam prakteknya, pemerintah dan sektor swasta (dunia bisnis) bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan tidak lupa mengikutsertakan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran ganda dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek dan juga sebagai objek dalam pembangunan.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan tangan panjang pemerintah dalam melakukan pembangunan. Ini sesuai dengan peran BUMN yaitu sebagai *agen of development* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu BUMN yang ada di Indonesia adalah PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Dengan berbagai produk usahanya, PT Petrokimia Gresik sangat berperan dalam pembangunan di Indonesia.

Dengan diterapkannya konsep *Good Governance* pada pemerintahan yang ada agar terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta membantu terwujudnya pembangunan di negara ini, paradigma ini juga memengaruhi kinerja perusahaan terutama perusahaan milik negara yang salah satunya adalah PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik menerapkan suatu paradigma perusahaan yaitu *Good Corporate Governance*. Penerapan konsep tersebut bertujuan agar perusahaan dapat menjadi perusahaan yang transparan, akuntabel dan terpercaya. *Good Corporate*

Governance yang diterapkan oleh PT Petrokimia Gresik akan meningkatkan prinsip kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*) perusahaan yang dapat dilihat dari program-program yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Salah satu prinsip yang sudah diterapkan adalah prinsip tanggung jawab dimana konsekuensi dari terlaksananya prinsip tersebut adalah dengan dilaksanakannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Petrokimia Gresik.

Dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT Petrokimia Gresik termasuk pada kategori kelompok hijau, dimana PT Petrokimia Gresik tidak hanya menganggap bahwa kegiatan ini adalah sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan karena terkait dengan peraturan-peraturan namun perusahaan juga menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan kebutuhan dimana mereka juga memerlukan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan yang mereka lakukan. Masyarakat juga merupakan aktor penting bagi perusahaan karena suatu perusahaan tidak akan menjadi besar tanpa adanya kontribusi berbagai pihak yang ada seperti masyarakat. Karena itulah sudah sewajarnya jika perusahaan-perusahaan publik lainnya melakukan tanggung jawab sosialnya seperti yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan yang seperti kita tahu pula bahwa pelaksanaan sebuah CSR harus

dilaksanakan atas dasar konsep *triple bottom line* dimana kita tidak hanya berpatokan pada *profit* (ekonomi) namun juga harus berpatokan pada *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan). Selain itu juga satu hal yang harus diingat adalah CSR tidak bisa dilaksanakan oleh perusahaan sendiri. Bentuk CSR yang kemudian disebut dengan PKBL ini dilakukan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa program ini tidak akan berhasil tanpa adanya kemitraan yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Analisis dari penelitian ini berkenaan dengan program kemitraan dan program bina lingkungan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berdasarkan atas konsep *triple bottom line* oleh PT Petrokimia Gresik.

1. Penerapan konsep *triple bottom line* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR PT Petrokimia Gresik (difokuskan pada Program Kemitraan yang ditinjau dari aspek *profit*)

Dari penelitian yang telah dilakukan maka data yang diperoleh dapat dianalisis mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang didasarkan atas konsep *triple bottom line* oleh PT Petrokimia Gresik. Pelaksanaan CSR yang dilakukan PT Petrokimia Gresik merupakan dampak dari diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perusahaan dalam menjaga kelangsungan bisnisnya dengan meningkatkan prinsip kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Hal ini dapat dilihat

dalam perusahaan membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan tersebut yang selanjutnya disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

**a. Program kerja dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PT Petrokimia Gresik**

Dalam melaksanakan PKBL, PT Petrokimia Gresik membentuk satu unit tersendiri yaitu Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan dipimpin oleh Manager Departemen KBL yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur SDM dan Umum PT Petrokimia Gresik. Kemudian di bawah Manager Departemen KBL ada Kabag Operasional KBL, Kabag Administrasi & Keuangan KBL dan Staf Perencanaan dan Pengendalian KBL. Di bawah Kabag Operasional KBL terdapat Staf Kemitraan dan Staf Bina Lingkungan. Di bawah Kabag Administrasi & Keuangan KBL terdapat Staf Pelaporan Kinerja dan Kasi Akuntansi & Keuangan. Masing-masing memiliki tupoksi dan program kerja yang berbeda yang tentunya berujung serta sangat menunjang keberhasilan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan tersebut. Dari penjelasan diatas bahwa PKBL yang dijalankan oleh PT Petrokimia Gresik telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan tupoksi sehingga pengelolaan program terlaksana secara efektif.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik ini tidak hanya dilaksanakan oleh Departemen

KBL sendiri. Ada aktor lain yang sangat berperan dan sangat berpengaruh yaitu mitra binaan PT Petrokimia Gresik. PKBL ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik antara Departemen KBL dengan para mitra binaan PT Petrokimia Gresik. Mitra binaan PT Petrokimia Gresik tidak hanya terdiri dari individu / perseorangan namun juga terdiri dari komunitas dan juga sebuah desa. Pelaksanaan PKBL dengan melibatkan aktor lain juga bisa menunjukkan prinsip *responsibility*. Dengan melibatkan aktor lain seperti para mitra binaan, komunitas dan sebuah desa perusahaan mewujudkan tanggung jawab sebagai lembaga dalam kehidupan masyarakat yang bisa mendorong ekonomi masyarakat sekitar. Haji Nadief yang merupakan mitra binaan PT Petrokimia Gresik menyatakan “Saya menyadari bahwa dukungan PT Petrokimia Gresik sangat membantu perjalanan usaha saya, mulai dari pinjaman modal kerja, beberapa pembinaan dan pameran yang saya ikuti mampu menjadi bekal saya untuk mengembangkan usaha petis ini” saat diwawancarai di tempat produksinya di Desa Gumeng.

Program Kemitraan sendiri yang berupa kegiatan pemberian pinjaman lunak kepada usaha kecil masyarakat dengan bunga yang cukup rendah yaitu sebesar 6 % per-tahun, tata cara syarat peminjaman modal yang mudah (terlampir dalam lampiran) serta pelaksanaan pameran yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperkenalkan produksi dari mitra binaan. Dengan bunga rendah, kemudahan tata cara syarat peminjaman modal dan pelaksanaan pameran telah menunjukkan

bahwa PT Petrokimia Gresik benar-benar berkomitmen dan sesuai dengan prinsip *fairness*, yaitu memperlakukan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.

b. Alokasi dana dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik

Realisasi penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Tahun 2012 mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan Tahun 2012. Realisasi Penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2012 mencapai sebesar Rp 61.193.517.500 dan ini meningkat 40% dibandingkan dengan RKA tahun 2011 yaitu Rp 41.704.446.000. PKBL PT Petrokimia Gresik meningkatkan volume kegiatan penyaluran dengan menambah dana yang disalurkan berasal dari bagian laba dan penerimaan angsuran dari mitra binaan.

1. Program Kemitraan

Penggunaan dana pinjaman modal kerja untuk masing-masing sektor sebagai berikut :

- a. Sektor Industri. Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Industri sebesar Rp 748.000.000 atau sebesar 51,92% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 1.440.605.000, menyesuaikan dengan proposal pengajuan pinjaman dari mitra binaan.
- b. Sektor Perdagangan. Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Perdagangan sebesar Rp 5.232.500.000 atau sebesar 107,39% bila

dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 4.872.572.000. Jumlah tersebut disalurkan pada 118 mitra binaan 81 mitra dari Jawa Timur, 25 mitra dari Jawa Tengah, 7 mitra dari Bali dan 5 mitra dari Lombok Tengah

c. Sektor Pertanian. Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Pertanian sebesar Rp 32.333.417.500 atau sebesar 159,26% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 20.302.383.000. Tingginya realisasi ini disebabkan mitra binaan tahap lanjutan telah melakukan pelunasan karena sudah memasuki musim tanam dan adanya pemberian pinjaman modal kerja untuk mitra binaan baru kelompok usaha tani dan turut mensukseskan program pemerintah dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Program GP3K.

d. Sektor Peternakan. Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Peternakan sebesar Rp 18.928.600.000 atau sebesar 171,22% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 11.055.081.000. Tingginya realisasi ini disebabkan sektor peternakan terutama peternakan sapi potong dikembangkan, sehingga kotoran sapi menjadi pendukung bahan baku industri pupuk organik/Petroganik dan mendukung penyediaan daging sapi.

e. Sektor Perikanan. Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Perikanan sebesar Rp 1.217.300.000 atau sebesar 153,36% bila

dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 793.763.000. Tingginya realisasi ini disebabkan adanya pemberian pinjaman untuk mitra binaan baru kelompok peternakan ikan gurami di Kabupaten Tulungagung dan mitra binaan baru petani tambak ikan bandeng di Kabupaten Gresik.

- f. Sektor Perkebunan. Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Perkebunan sebesar Rp 2.623.700.000 atau sebesar 143,68% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 1.826.110.000. Tingginya realisasi ini untuk mendukung swasembada gula di Jawa Timur dengan meningkatkan jumlah mitra binaan sektor perkebunan yaitu petani tebu murni yang belum menjadi mitra binaan BUMN lain dan tidak terikat pinjaman oleh pihak manapun.
- g. Sektor Jasa. Realisasi penggunaan dana untuk Sektor Jasa sebesar Rp 110.000.000,00 atau sebesar 35,00% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 314.255.000,00, rendahnya realisasi ini karena menyesuaikan dengan proposal pengajuan pinjaman dari mitra binaan.
- h. Pembinaan/Hibah. Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembinaan berupa pelatihan dan pameran/promosi mitra binaan mencapai Rp6.603.156.335 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER – 05/MBU/2007 pasal 11 ayat 1 c.2.

- i. Pameran/Promosi. Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pameran/ promosi sebesar Rp904.486.335 atau sebesar 22,28% dari RKA Tahun 2012 sebesar Rp4.060.447.000. Rendahnya realisasi ini disebabkan selektifitas kegiatan pameran dan konsep kesesuaian kegiatan perusahaan dengan jenis kegiatan mitra binaan.
- j. Bantuan Pendidikan/Pelatihan. Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan/ pelatihan sebesar Rp 5.698.670.000 atau sebesar 93,56% bila dibandingkan dengan RKA Tahun 2012 sebesar Rp 6.090.715.000.

Transparency merupakan salah satu prinsip dalam GCG, dari data diatas PT Petrokimia Gresik telah menerapkan prinsip *transparency* dalam keterbukaan mengemukakan informasi materiil. Dengan menerapkan dan mengembangkan *information technology* dan *management information system* para *stakeholders* bisa mengakses melalui website PT Petrokimia Gresik dan melihat langsung pada *Annual Report* yang diterbitkan setiap akhir tahun.

c. Sasaran atau target Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik

PKBL PT Petrokimia Gresik telah melakukan aksi yang nyata dalam bentuk program kemitraan, yang semuanya bermuara pada pemenuhan hak hidup masyarakat yang lebih sejahtera baik langsung

maupun tidak langsung. Dua aksi nyata yang dilakukan Departemen KBL Petrokimia Gresik untuk mengatasi kesenjangan, yaitu dengan : 1) melakukan pengembangan usaha kecil dan mikro melalui program kemitraan, dan 2) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. PKBL PT Petrokimia Gresik berkomitmen penuh untuk menjalankan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha kecil agar memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan, dengan memperluas akses usaha kecil yang tidak *bankable* pada permodalan usaha. Berbagai sektor sasaran PKBL PT Petrokimia Gresik adalah sektor pertanian, industri, peternakan, perikanan, perdagangan, perkebunan, dan jasa.

Berbagai pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT Petrokimia Gresik telah membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi. Dan berbagai kegiatannya telah direalisasikan sesuai dengan aspek ekonomi (*profit*) seperti kewirausahaan, usaha produktif, dan terbukanya lapangan pekerjaan baru yang diciptakan oleh mitra binaannya. Salah satu mitra binaan PT Petrokimia Gresik adalah Ibu Titik yang mempunyai usaha produktif setelah mengikuti pelatihan keterampilan oleh PT Petrokimia Gresik. Bersama tiga karyawannya Ibu Titik

mampu menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi dan berbahan baku kulit limbah industri. Ibu Titik mengatakan “Berawal dari keinginan hanya ingin mengisi ruang dengan mengikuti Pelatihan Keterampilan yang diadakan PT Petrokimia Gresik, saya bisa menikmati hasil jerih payah dan bisa mempekerjakan tiga orang karyawan”. Pada akhirnya, berbagai upaya tersebut akan mendorong ke arah keberhasilan pelaksanaan program pengembangan potensi masyarakat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar dalam mendorong dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

d. Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik (dari faktor internal maupun eksternal)

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui pendukung dari penerapan *triple bottom line* dalam pelaksanaan PKBL sebagai bentuk CSR PT Petrokimia Gresik adalah adanya dukungan dan hambatan yang datang dari perusahaan sendiri (internal) dan mitra binaan (eksternal). Dukungan internal yang pertama yaitu dengan adanya komitmen yang tinggi dari perusahaan sendiri terhadap pelaksanaan CSR. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan perusahaan dalam menerapkan GCG yang berujung pada dilaksanakannya tanggung jawab sosial perusahaan khususnya BUMN yang disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Keseriusan

lain yang dapat dilihat yaitu dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang mengatur segala suatu mulai dari struktur organisasi sampai syarat-syarat menjadi mitra binaan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak PT Petrokimia Gresik dengan mitra binaan yang memudahkan dan melancarkan jalannya informasi. Dengan demikian maka terjadilah komunikasi dua arah yang baik.

Dukungan eksternal juga sangat berpengaruh selain adanya dukungan dari internal. Dukungan eksternal yang pertama yaitu tingginya responsifitas mitra binaan dalam menerima program yang dijalankan PT Petrokimia Gresik. Dengan tingginya responsifitas banyak dari mitra binaan yang masih ingin menjalin kemitraan dengan pihak PT Petrokimia Gresik karena adanya berbagai kemudahan yang diberikan. Kemudahan ini yang mengakibatkan dampak positif kepada mitra binaan yaitu semakin majunya usaha yang dijalankan. Kemajuan usaha ini yang kemudian menjadi alasan bahwa kemitraan ini pantas untuk dilaksanakan terus menerus.

Dalam pelaksanaan PKBL ini juga ditemukan hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini. Hambatan ini sebagian besar berasal dari pihak mitra binaan itu sendiri. Hambatannya adalah kemampuan SDM pengelola usaha rendah, sehingga kurang adanya inovasi untuk meningkatkan daya saing produk. Kesulitan dalam pemasaran yang dihadapi oleh mitra binaan karena persaingan usaha dan lingkup pemasaran produk yang terbatas. Masyarakat yang selalu

tidak puas atas program PKBL dalam program bantuan sarana dan prasarana, ini juga menyebabkan sebagian masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh PT Petrokimia Gresik.

2. *Input, output, outcomes, benefit, dan impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Petrokimia Gresik

a. *Input* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Menurut Solichin (2008:12) *input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi seperti manusia, informasi kebijakan, dan sebagainya. Adapun *input* dari PKBL PT Petrokimia Gresik antara lain anggaran yang dialokasikan serta sumber daya manusia yang kompeten dan memadai. Dalam pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik anggaran yang digunakan sudah sepenuhnya disalurkan dengan baik kepada semua mitra binaan PT Petrokimia Gresik. Kemudian *input* selanjutnya yaitu SDM yang kompeten dan memadai dari Departemen KBL PT Petrokimia Gresik. Kualitas SDM para karyawan Departemen KBL PT Petrokimia Gresik ini sudah memiliki keahlian yang cukup baik pada bidangnya. Hal ini terlihat dari lancarnya operasional dari program-program yang dijalankan dan mencapai hasil yang memuaskan.

b. Output dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan nyata PT Petrokimia Gresik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Menurut Solichin (2008:12) *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik maupun non fisik. PKBL PT Petrokimia Gresik diharapkan memberi kontribusi positif kepada masyarakat terutama disekitar wilayah usaha perusahaan baik berupa pinjaman kemitraan, pembinaan pelatihan dan bantuan bina lingkungan. Pembinaan mitra binaan dilakukan untuk membekali kemampuan usaha sehingga diharapkan usaha dapat berkembang dengan baik dan mampu mengembalikan dana pinjaman kemitraan. Penggunaan dana bina lingkungan dimaksudkan juga untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan industri untuk mendukung kelangsungan usaha perusahaan.

c. Outcomes dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Solichin (2008:12) *outcomes* (hasil yang dapat dimanfaatkan) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung). Melalui kegiatan PKBL PT Petrokimia Gresik, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut bagi PT Petrokimia Gresik, terlaksananya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk kinerja yang diperlihatkan secara nyata sebagai bentuk tanggung jawab

sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan bagi masyarakat melalui program kemitraan, masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah akan mudah mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga yang ringan untuk pengembangan usahanya, selain itu melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan, para mitra binaan akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kemampuan / skill mereka dalam berwirausaha. Sedangkan melalui kegiatan pameran, produk-produk dari mitra binaan akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk program bina lingkungan, masyarakat dapat secara cuma-cuma mendapatkan bantuan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, bantuan bencana alam dan bantuan lain untuk masyarakat. Selain itu melalui program pelestarian lingkungan hidup yang diperoleh adalah terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik lagi.

d. *Benefit* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Benefit atau manfaat jangka panjang yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan (Solichin, 2008:12). Tujuan akhir dari pelaksanaan PKBL sebagai bentuk CSR PT Petrokimia Gresik adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan yang digambarkan oleh John's Elkington sebagai *triple bottom line* yaitu pertemuan dari tiga pilar pembangunan yaitu

people (masyarakat) *planet* (lingkungan) dan *profit* (ekonomi) yang merupakan tujuan dari pembangunan.

e. Impact dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Berdasarkan dampak positif dan negatif yang telah disebutkan, pelaksanaan PKBL sebagai bentuk CSR PT Petrokimia Gresik memang tidak sepenuhnya memperoleh hasil seperti yang diharapkan yaitu mendapatkan dampak positif sepenuhnya. Memang perlu diusahakan agar mencapai hasil yang maksimal serta membawa dampak positif, baik bagi PT Petrokimia Gresik sebagai subyek pelaksana maupun masyarakat dan lingkungan sebagai obyek pelaksana, sehingga kedepannya perlu dikaji kembali pelaksanaannya. Dukungan serta pengawasan baik dari pihak PT Petrokimia Gresik maupun dari para *stakeholders* terhadap program ini masih sangat dibutuhkan, sehingga hasil dari pelaksanaan PKBL ini dapat sesuai dengan harapan banyak pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan konsep *triple bottom line* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR pada PT Petrokimia Gresik, maka dapat dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *triple bottom line* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk CSR PT. Petrokimia Gresik

Penerapan konsep *triple bottom line* dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT Petrokimia Gresik sudah cukup baik. Dimana program yang dilaksanakan telah sesuai dengan program CSR perusahaan yang berdasarkan atas konsep *triple bottom line* yang merupakan dampak dari diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh PT Petrokimia Gresik dalam menjaga kelangsungan bisnisnya. Selain itu pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

2. *Input, output, outcomes, benefit, dan impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)PT. Petrokimia Gresik

a. *Input* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Input dari PKBL PT Petrokimia Gresik ini antara lain anggaran yang dialokasikan serta sumber daya manusia yang kompeten dan memadai. Dari segi SDM sudah cukup baik karena rata-rata karyawannya mempunyai pendidikan yang memadai dan berkompoten. Anggaran yang dialokasikan sudah mencukupi dan disalurkan dengan benar sehingga program dapat berjalan dengan maksimal.

b. *Output* berupa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Output yang didapat dari *input* diatas adalah berjalannya program dengan maksimal. Dana yang dialokasikan untuk program kemitraan dapat disalurkan dengan benar kepada seluruh mitra binaannya. Penggunaan dana bina lingkungan dimaksudkan juga untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan industri untuk mendukung kelangsungan usaha perusahaan.

c. *Outcomes* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Manfaat langsung yang dapat dirasakan dari program kemitraan PT Petrokimia Gresik adalah masyarakat sekitar yang memiliki usaha kecil dapat terbantu dalam hal pengembangan usaha. Sedangkan melalui

program bina lingkungan, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bantuan sarana dan prasarana yang layak, serta kondisi lingkungan yang lebih baik.

d. *Benefit* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Manfaat jangka panjang atau *benefit* yang diperoleh melalui pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan yang digambarkan oleh John's Elkington sebagai *triple bottom line* yaitu pertemuan dari tiga pilar pembangunan yaitu *people* (masyarakat) *planet* (lingkungan) dan *profit* (ekonomi) yang merupakan tujuan dari pembangunan.

e. *Impact* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Dampak positif yang timbul diantaranya adalah para mitra binaan menjadi lebih mandiri dalam menjalankan usahanya, mampu menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan cenderung tinggi akibat pemberian bantuan dalam program bina lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik baik kerja perlu dikaji kembali agar meminimalisir dampak negatifnya. Dari dampak yang disebutkan, dapat dilakukan evaluasi rutin setiap tahun. Selain tindakan permodalan bisa dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan pada mitra binaan yang susah berkembang agar lebih mandiri dan tidak menjadi ketergantungan pada pinjaman tersebut. Pelaksanaan pameran juga bisa dilakukan secara rutin, agar para mitra binaan baru bisa memasarkan produknya dan bisa berkembang dengan cepat.
2. Dukungan serta pengawasan pada pelaksanaan PKBL PT Petrokimia Gresik masih sangat dibutuhkan sehingga hasil dari pelaksanaan PKBL ini dapat sesuai dengan harapan banyak pihak. Dukungan bisa dilakukan dengan memberikan arahan langsung kepada mitra binaan, dengan mengundang beberapa mitra binaan yang sudah sukses dan usahanya yang maju untuk memotivasi dan memberikan arahan langsung kepada para mitra binaan yang baru untuk bisa berkembang dan tidak menjadi ketergantungan. Pengawasan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik bisa dilakukan dengan menyelaraskan penyaluran dan penggunaan dana kemitraan dan bina lingkungan dengan strategi bisnis perusahaan. Perlu dipertimbangkan lagi berbagai pola penagihan terhadap mitra binaan guna memperkecil risiko kemacetan pengembalian pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Annual Report* PT Petrokimia Gresik 2012.
- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Diah, Marwah. 2003. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?*. Jakarta Pusat: Literata Lintas Media.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gresik Dalam Angka 2013 BPS Kabupaten Gresik.
- Gie, Liang dan Sutarto. 1978. *Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Ibrahim. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Indradi, Sjamsiar, Sjamsuddin. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang: Argitek YPN Malang.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8 No. 1 Ed Maret.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang *Good Corporate Governance*.
- Khairandy, Ridwan dan Malik, Camelia. 2007. *Good Corporate Governance "Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum"*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maskum, Azhar. 2005. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Diakses pada tanggal 9 Februari 2012 dari <http://foresterazharmaskum.blogspot.com/2005/good-corporate-governance.html>
- Mindarti, Lely, Indah. 2005. *Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*. Malang: Partner Press.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pandji, Anoraga. 1995. *BUMN, Swasta, dan Koperasi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No.:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance "Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan"*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sholichin, Dadang. 2008. *Jurnal Seminar Penetapan Indikator Kerja Bappeda*, Bappenas.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Strategi, dan Dimensinya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukidin, Damai, Darmadi. 2009. *Administrasi publik*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thoha, Miftah. 2005. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untung, Hendrik, Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Isa dan Azheri, Busyra. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Peraturan dan Implementasi*. Malang: In-Trans Publishing.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Cetakan 1. Gresik: Fascho Publishing.

Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Riset



PT PETROKIMIA GRESIK

Produsen pupuk terlengkap di Indonesia



KANTOR PUSAT :

Alamat : Jl. Jenderal Akmad Yani, Gresik 61119
Kotak Pos : 102 Gresik 61101
Telepon : (031) 3981811 - 3981814, 3982100, 3982200
Facsimile : (031) 3981722, 3982272
E-mail : pkg@petrokimia-gresik.com
Home Page : www.petrokimia-gresik.com

KANTOR PERWAKILAN :

Alamat : Jl. Tanah Abang III No. 16 Jakarta 10160
Kotak Pos : 1365 Jakarta 10000
Telepon : (021) 3446459, 3446645
Facsimile : (021) 3841994
E-mail : petrogrk@cbn.net.id
perjaka@petrokimia-gresik.com

PUSAT LAYANAN PELANGGAN :

Telepon Bebas Pulsa : 0800.1.636363 & 0800.1.888777
Facsimile : (031) 3979976
E-mail : layananpelanggan@petrokimia-gresik.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1501/NK.02.02/03/KR/2014

PT Petrokimia Gresik menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

- N a m a : *Alan Amara*
- Nomor Induk : 0910310005
- Program Studi : S1 – Administrasi Publik – FIA – Universitas Brawijaya Malang

telah menyelesaikan kegiatan penelitian (pengambilan data) di PT Petrokimia Gresik pada tanggal 01/04/2014 s.d. 30/04/2014 dengan judul “ Penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik) ”.

Selama melakukan kegiatan penelitian, mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan perusahaan dan melaksanakan kegiatannya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 30/04/2014

PT Petrokimia Gesik

Manajer Pendidikan dan Pelatihan



Il. H. Yudwiastuti

Kabag Penyelenggaraan & Evaluasi Diklat

Interview Guide

Pihak PKBL (Departemen KBL PT Petrokimia Gresik)

1. Bagaimana sejarah terbentuknya PKBL?
2. Bagaimana pelaksanaan PKBL sejauh ini?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap program PKBL?
4. Apakah sudah tepat sasaran?
5. Apakah penggunaan dana pada anggaran sudah berjalan semestinya?
6. Apakah di mitra binaan ada penyimpangan yang dilakukan pada program PKBL?
7. Bagaimana hubungan antara pihak penyelenggara PKBL dengan mitra binaan?
8. Apa saja keuntungan bagi setiap pihak dengan adanya program PKBL?

Pihak Mitra Binaan

1. Bagaimana awal mula ikut dalam program PKBL?
2. Apakah persyaratan menjadi mitra binaan yang diberikan pihak PKBL dipermudah?
3. Apakah pendampingan program PKBL berpengaruh pada mitra binaan?
4. Sejauh mana pengaruh PKBL bagi usaha kecil?
5. Apakah sudah berjalan efektif?

CURRICULUM VITAE PENULIS

1. NAMA : Alan Amara
2. TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Gresik, 08 September 1990
3. ALAMAT ASAL : Jl. Baja 10/09 Pongangan, Manyar
PROVINSI : Jawa Timur
KABUPATEN/KOTA : Gresik
NO. TELP : (031) 3951872
NO. HANDPHONE : 081293782708
4. ALAMAT DI MALANG : Vila Bukit Tidar C1-003
PROVINSI : Jawa Timur
KABUPATEN/KOTA : Malang
5. ALAMAT EMAIL : alanamara689@gmail.com



